



KEMENTERIAN
KELAUTAN DAN
PERIKANAN



BerAKHLAK
Berorientasi ke Masyarakat, Berkeadilan, Berkeadilan
Harmoni Loyalitas, Adaptif, Kolaborasi

DOKUMEN RENCANA KEGIATAN BALAI PELATIHAN DAN PENYULUHAN PERIKANAN TEGAL TAHUN 2020 - 2024

BAB I

PENDAHULUAN

1. *Latar Belakang*

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024 yang telah ditetapkan melalui Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 menjadi basis dalam pembangunan nasional 5 (lima) tahun kedepan, termasuk pembangunan kelautan dan perikanan. RPJMN 2020-2024 merupakan tahapan keempat dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005-2025 yang telah ditetapkan melalui Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007, yakni memantapkan pembangunan secara menyeluruh di berbagai bidang dengan menekankan pencapaian daya saing kompetitif perekonomian berlandaskan keunggulan sumberdaya alam dan sumberdaya manusia berkualitas serta kemampuan IPTEK yang terus meningkat. Pengelolaan sumberdaya alam yang berkelanjutan, iptek dalam era globalisasi tidak lepas dari pembangunan sumber daya manusia.

Berdasarkan uraian di atas, maka diperlukan ketersediaan SDM KP kompeten dan berkarakter yang dilakukan melalui kegiatan pendidikan, pelatihan, dan penyuluhan yang merupakan proses pemberdayaan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Salah satu kenyataan yang dihadapi pada sektor perikanan, umumnya usaha perikanan didominasi oleh usaha skala kecil, tingkat pendidikan pembudidaya ikan, pengolah ikan maupun nelayan (pelaku utama) masih rendah, dan bermodal kecil. Kondisi dengan skala usaha kecil umumnya belum mampu menerapkan teknologi inovatif sehingga menjadi kurang efisien dan akan berakibat pada penurunan kuantitas maupun kualitas produk yang dihasilkan.

Hal utama yang harus dicermati adalah bahwa keberhasilan pembangunan perikanan sangat tergantung pada perubahan perilaku pelaku utama dalam menyikapi tantangan tersebut. Selain peningkatan sumberdaya manusia yang berkualitas, penyuluhan perikanan mempunyai kedudukan yang sangat strategis dalam pembangunan perikanan, karena mempunyai tugas dan fungsi untuk menyelenggarakan proses alih informasidan teknologi (tranfer knowledge) bagi

pelaku utama beserta keluarganya serta anggota masyarakat lainnya. Terlebih lagi, pasca terbitnya Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah pada Lampiran Y Sub Urusan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan, dimana penyelenggaraan penyuluhan perikanan menjadi kewenangan pusat, sehingga BRSDM melalui Pusat Pelatihan dan Penyuluhan KP harus mampu memainkan peran strategisnya agar penyelenggaraan penyuluhan perikanan dapat berjalan efektif, efisien dan kompeten.

Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) menyusun Rencana Strategis KKP 2020-2024 yang tertuang dalam Rancangan Teknokratik Rencana Strategis Kementerian Kelautan dan Peikanan Tahun 2020 – 2024 menjelaskan visi KKP yang sama dengan visi pembangunan nasional tahun 2020-2024 yang menggunakan visi Presiden Republik Indonesia yaitu “Terwujudnya Indonesia yang maju berdaulat, mandiri, dan berkepribadian, berlandaskan gotong royong” yang diartikan dimana saat Indonesia telah sungguh-sungguh berdaulat , mandiri, dan berkepribadian yang diwujudkan dengan kerja gotong royong, maka saat itulah Indonesia telah menjadi Indonesia meju sesuai pada cita-cita kemerdekaan yangtertuang pada pembukaan UUD 1945.

Keberadaan Balai Pelatihan dan Penyuluhan Perikanan Tegal dibawah Pusat Pelatihan dan Penyuluhan memiliki peran yang strategis dalam mendukung visi dan misi Presiden Republik Indonesia dan Kementerian Kelautan dan Perikanan melalui:

1. Peningkatkan keterampilan dan kompetensi SDM sehingga dapat meningkatkan produksi dan produktivitas, nilai tambah dan daya saing produk kelautan dan perikanan secara optimal melalui pelatihan dan sertifikasi;
2. Mewujudkan pelaku utama yang mandiri, kompeten, sadar dan peduli terhadap inovasi teknologi, kelestarian dan keberlanjutan sumberdaya kelautan dan perikanan;
3. Membantu dalam meningkatkan ekonomi para pelaku usaha melalui penumbuhan dan pembentukan usaha mikro, kecil dan koperasi sektor kelautan dan perikanan; serta
4. Meningkatkan pengelolaan alih teknologi bidang kelautan dan perikanan secara efektif dan efisien dan tepat sasaran melalui diseminasi dan pelatihan.

2. Kondisi Umum

Dalam melaksanakan tugasnya untuk meningkatkan kualitas sumberdaya manusia kelautan dan perikanan melalui kegiatan pelatihan, BPPP Tegal memiliki tenaga kediklatan yang berpengalaman dan kompeten di bidangnya dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 1. Jumlah Pegawai BPPP Tegal menurut golongan tahun 2018-2021 *Satuan : Orang*

<i>Jabatan</i>	<i>2018</i>	<i>2019</i>	<i>2020</i>	<i>2021 (Jan)</i>
Struktural	5	5	5	5
Fungsional umum	30	30	28	28
Fungsional Widyaiswara	10	10	8	8
Fungsional Arsiparis	1	1	1	1
Fungsional Instruktur	25	24	20	20
Fungsional Penyuluh	-	382	348	348
Jumlah	71	452	410	410

Sumber: Sub Bagian Tata Usaha BPPP Tegal

Menurut jabatannya, pegawai BPPP Tegal terdiri atas: 1 orang pejabat eselon III, 4 orang pejabat eselon IV, 377 orang pejabat fungsional tertentu, dan 28 orang pelaksana.

Berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor Per 87/PERMEN-KP/2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pelatihan dan Penyuluhan Perikanan, struktur organisasi Balai Pelatihan dan Penyuluhan Perikanan Tegal adalah sebagai berikut:



Gambar 1. Struktur Organisasi BPPP Tegal

BPPP Tegal memiliki susunan organisasi yang terdiri dari:

1. Sub Bagian Umum

mempunyai tugas melakukan penyusunan, pemantauan, dan evaluasi rencana, program, dan anggaran, pelaporan, urusan keuangan, hubungan masyarakat, organisasi dan tata laksana, kepegawaian, persuratan, kearsipan, dokumentasi, rumah tangga, pengelolaan barang milik negara dan perlengkapan, serta pengelolaan prasarana dan sarana pelatihan dan penyuluhan perikanan.

2. Kelompok Jabatan Fungsional

mempunyai tugas memberikan pelayanan fungsional dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Balai Pelatihan dan Penyuluhan Perikanan sesuai dengan bidang keahlian dan keterampilan.

Kepala Badan Riset dan Sumberdaya Manusia Kelautan dan Perikanan melalui Surat Keputusan Kepala Badan Riset dan Sumberdaya Manusia Kelautan dan Perikanan Nomor 612/KEP-BRSDM/2020 tentang Wilayah Kerja Unit Pelaksana Teknis Yang Menangani Penyuluhan di Lingkungan Badan Riset dan Sumberdaya Manusia Kelautan dan Perikanan tanggal 2 januari 2020, menetapkan Balai Pelatihan dan Penyuluhan Perikanan Tegal sebagai Unit Pelaksana Teknis yang menangani penyuluhan kelautan dan perikanan dengan jumlah penyuluh total per Agustus 2020 sebanyak 636 orang yang terdiri atas 348 penyuluh PNS dan 288 penyuluh kontrak dengan rincian sebagai berikut :

1. Provinsi Jawa Tengah sebanyak 421 Orang, 219 PNS dan 196 Kontrak
2. Provinsi DI Yogyakarta sebanyak 51 Orang, 26 PNS dan 24 Kontrak
3. Provinsi Kalimantan Barat sebanyak 124 Orang, 77 PNS dan 45 Kontrak
4. Provinsi Kalimantan Timur sebanyak 49 Orang, 26 PNS dan 23 Kontrak

3. *Potensi dan Permasalahan*

Balai Pelatihan dan Penyuluhan Perikanan Tegal adalah bagian dari Badan Riset dan Sumberdaya Manusia Kelautan dan Perikanan dan salah satu dari 5 (lima) Balai Pelatihan dan Penyuluhan Perikanan yang ada di Indonesia. Dari kelima balai latlul perikanan yang ada di Indonesia saat ini, balai latlul perikanan Tegal memiliki keunggulan yaitu:

1. Letak yang strategis berada pada jalur pantura Jawa, ditengah Kota Tegal dan berada pada lingkungan perikanan yang produktif.

2. SDM pelatih dan penyuluh ahli dan berpengalaman dibidangnya.
3. Workshop sebagai sarana praktek.
4. Komitmen yang kuat dari pimpinan dan jajaran staf untuk mencapai tujuan organisasi.
5. Tersedianya Standar Operasional Prosedur (SOP) penyelenggaraan pelatihan sesuai manajemen mutu (ISO 9001 : 2015)
6. Adanya akreditasi dari Direktorat Perhubungan Laut, Kementerian Perhubungan untuk menyelenggarakan diklat *Basic Safety Training* (BST)
7. Adanya mandat dari Lembaga Sertifikasi Profesi Kelautan dan Perikanan kepada BPPP Tegal sebagai Tempat Uji Kompetensi (TUK)
8. BPPP Tegal telah memiliki Lembaga Sertifikasi Profesi sehingga akan dapat menerbitkan sertifikat kompetensi sendiri
9. SDM Asesor BPPP Tegal sehingga akan mampu melaksanakan uji kompetensi dengan jumlah peserta yang banyak
10. BPPP Tegal mampu membuat sarana produksi perikanan tertentu
11. BPPP Tegal mampu menghasilkan produk perikanan yang layak dipasarkan
12. BPPP Tegal mampu menghasilkan teknologi tepat guna untuk meningkatkan kualitas garam rakyat
13. BPPP Tegal mampu memproduksi garam beryodium dengan bahan baku yang berasal dari garam rakyat
14. BPPP Tegal memiliki instalasi budidaya ikan air tawar yang strategis untuk pengembangan budidaya ikan air tawar
15. BPPP Tegal mampu melakukan pelatihan daring yang memungkinkan peserta melakukan praktek dan dipandu langsung oleh pelatih

Disamping keunggulan internal yang telah dimiliki, BPPP Tegal juga memiliki potensi keunggulan yang berasal dari luar BPPP Tegal yaitu:

1. Adanya komitmen pimpinan BRSDMKP untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas layanan kepada masyarakat kelautan dan perikanan.
2. Adanya kecenderungan permintaan produk barang maupun jasa dari BPPP Tegal
3. Adanya persyaratan kepada setiap tenaga kerja untuk memiliki sertifikat kompetensi tertentu.

4. Adanya kecenderungan yang meningkat dari lembaga pemerintah, swasta, dan perorangan untuk menjalin kerjasama dengan BPPP Tegal.
5. Adanya kesempatan bagi tenaga kediklatan untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan di dalam dan luar negeri
6. Adanya kebijakan untuk mengoptimalkan pemakaian sarana yang dimiliki
7. Jumlah wilayah kerja BPPP Tegal yang mencakup 7 propinsi memiliki potensi peserta diklat yang cukup besar.
8. Adanya regulasi yang mewajibkan calon pelaut untuk memiliki sertifikat keselamatan kerja di laut
9. Adanya program pemerintah untuk meningkatkan produksi perikanan baik untuk keperluan konsumsi maupun non konsumsi sehingga memerlukan banyak SDM yang harus melaksanakan kegiatan produksi dengan kompetensi tertentu
10. Adanya upaya untuk mengurangi biaya produksi budidaya perikanan melalui pakan ikan murah sehingga diharapkan produksi pakan murah dengan kualitas yang baik dapat terserap oleh pasar
11. Ada kecenderungan gaya hidup masyarakat untuk memenuhi protein hewani, dari daging merah kepada daging putih.
12. Adanya kebijakan pemerintah untuk mengurangi impor garam
13. Adanya kebijakan untuk membangun budidaya yang berkelanjutan dan berdaya saing
14. Terbitnya Perpres no. 18 tahun 2019 tentang Pengesahan International Convention on Standards of Training Certification and Watchkeeping for Fishing Vessel Personnel, 1995 (Konvensi Internasional tentang Standar Pelatihan, Sertifikasi, dan Dinas Jaga Bagi Awak Kapal Penangkap Ikan, 1995)
15. Adanya kebijakan pemerintah yang membatasi penggunaan jenis alat tangkap ikan sehingga nelayan membutuhkan alternative baik alat tangkap maupun pekerjaan.

Permasalahan yang berpotensi menghambat kinerja BPPP Tegal terdiri dari 2 (dua) aspek yaitu pelatihan dan penyuluhan dengan rincian sebagai berikut:

Aspek penyelenggaraan pelatihan KP antara lain:

1. Ketersediaan tenaga pelatih (instruktur dan widyaiswara) yang terus berkurang dikarenakan beberapa sudah memasuki usia purnatugas dan mutasi.

2. Sarana dan prasarana pelatihan belum sesuai dengan standar minimal pelatihan yang ditetapkan dan tidak lagi sesuai dengan perkembangan teknologi saat ini.
3. Kurikulum dan modul belum seluruhnya tersedia dan terstandarisasi.
4. Kurangnya program pengembangan SDM pelatih.

Sedangkan aspek penyelenggaraan penyuluhan antara lain:

1. Kelembagaan penyuluhan perikanan belum berjalan dengan optimal.
2. Kualitas dan kuantitas penyebaran penyuluh perikanan masih belum memadai.
3. Kuantitas dan kualitas materi penyuluhan perikanan masih terbatas dalam aksesibilitasnya.
4. Sarpras penyuluhan belum mencukupi kebutuhan pelaksanaan tugas penyuluh.
5. Pembiayaan penyelenggaraan penyuluhan masih terbatas.
6. Legislasi dan regulasi belum seluruhnya tersedia.
7. Batasan peran pemerintah daerah belum jelas, terutama terkait penyelenggaraan penyuluhan pasca UU No.23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah.

4. *Lingkungan Strategis*

Balai Pelatihan dan Penyuluhan Perikanan Tegal memiliki tugas melaksanakan penyusunan bahan kebijakan, program dan anggaran, penyelenggaraan, evaluasi dan pelaporan pelatihan dan penyuluhan di bidang kelautan dan perikanan, tugas tersebut akan telaksana dengan melakukan fungsi-fungsi : (a) penyusunan bahan kebijakan pelatihan dan penyuluhan, (b) penyusunan program dan anggaran, serta monitoring, evaluasi dan pelaporan pelatihan dan penyuluhan, (c) pelatihan teknis dan manajerial bidang perikanan, (d) penyusunan materi, metodologi dan pelaksanaan penyuluhan perikanan, (e) pemantauan kebutuhan pembentukan jaringan pengembangan tenaga teknis dan manajerial di bidang perikanan, (f) pengelolaan prasarana dan sarana pelatihan dan penyuluhan, (g) pengembangan dan fasilitasi kelembagaan dan forum masyarakat bagi pelaku utama dan pelaku usaha, (h) penyusunan kebutuhan peningkatan kapasitas penyuluh Pegawai Negeri Sipil (PNS) , swasta dan swasta, dan (i) pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga.



Gambar 2. Analisis SWOT BPPP Tegal

Secara teoritis, lingkungan strategis ini dapat diartikan sebagai situasi faktor yang strategis baik internal maupun eksternal yang dapat mempengaruhi pencapaian tujuan BPPP Tegal. Dalam hal ini, yang dimaksud dengan situasi faktor yang strategis tersebut adalah faktor-faktor strategis yang bersumber dari internal (Internal Factor Strategic) maupun eksternal (External Factor Strategic) baik yang bersifat statis maupun dinamis yang tercakup dalam perspektif wilayah baik di tingkat global, regional, nasional maupun sektoral. Faktor-faktor strategis internal tersebut meliputi faktor-faktor strategis yang berhubungan dengan kekuatan (strength) dan kelemahan (weaknes), sedangkan faktor-faktor strategis eksternal meliputi faktor-faktor strategis yang berhubungan dengan peluang (opportunity) dan ancaman (threats).

5. *Isu Strategis*

Dalam merespon sejumlah isu yang berkembang disektor kelautan dan perikanan, keberadaan Pusat Pelatihan dan Penyuluhan Kelautan dan Perikanan berperan sangat penting. Beberapa isu strategis yang memerlukan kontribusi dari hasil pelatihan dan penyuluhan dikaitkan dengan program nasional dan kementerian, diantaranya adalah:

- a) Kebijakan pengelolaan lobster, penanganan sampah plastic laut (marine plastic debris), ratifikasi Konvensi Internasional tentang standard pelatihan sertifikasi dan dinas jaga bagi awak kapal penangkap Ikan (STCWF).
- b) Pengembangan enterprenuership menuju technopreneurship, penguatan dan pemberdayaan kelompok masyarakat yang mampu memanfaatkan iptek untuk meningkatkan produktifitas dan daya saing dengan didukung oleh tata kelola yang baik (good governance). Para pelaku usaha KP perlu difasilitasi untuk pemenuhan kebutuhan sarana prasarana, akses terhadap permodalan, pemasaran hasil dan akses terhadap teknologi serta informasi, termasuk peningkatan kemampuan dalam menjalankan co-management pengelolaan sumberdaya KP melalui peningkatan kompetensi dan pendampingan;
- c) Peningkatan keterampilan dan kompetensi dibidang teknik budidaya ikan (akuakultur), penangkapan, pengolahan produk dan peningkatan nilai tambah, keamanan pangan, konservasi melalui pengenalan alat tangkap ramah lingkungan dan pengelolaan sumberdaya pesisir dan laut serta adaptasi perubahan iklim, termasuk didalamnya memperkenalkan mata pencaharian alternatif.
- d) Dalam bidang ekonomi dan industri, pada tahun 2016 Indonesia memasuki era ASEAN Economic Community (AEC) atau Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) sebagai konsekuensi dari berlakunya kesepakatan internasional. Beberapa persoalan mendasar yang dihadapi Indonesia dalam rangka menghadapi MEA, yaitu: 1) masih tingginya jumlah pengangguran terselubung (disguised unemployment); 2) rendahnya jumlah wirausahawan baru untuk mempercepat perluasan kesempatan kerja; 3) pekerja Indonesia didominasi oleh pekerja tak terdidik sehingga produktivitas tenaga kerja menjadi rendah; 4) meningkatnya jumlah pengangguran tenaga kerja terdidik, akibat ketidaksesuaian antara lulusan perguruan tinggi dengan kebutuhan pasar tenaga kerja; 5) ketimpangan produktivitas tenaga kerja antarsektor ekonomi; 6) sektor informal mendominasi lapangan pekerjaan, dimana sektor ini belum mendapat perhatian optimal dari pemerintah; 7) pengangguran di Indonesia merupakan pengangguran tertinggi dari 10 negara anggota ASEAN; ketidaksiapan tenaga kerja terampil dalam menghadapi MEA; 8) tuntutan pekerja terhadap upah minimum, tenaga kontrak, dan jaminan sosial ketenagakerjaan; serta 9) masalah Tenaga Kerja Indonesia yang banyak tersebar di luar negeri



Gambar 3. Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Indonesia yang membutuhkan peranan pelatihan dan penyuluhan

- e) Implementasi Peraturan Presiden Republik Indonesia nomor 18 tahun 2019 tentang Pengesahan *International Convention on Standards of Training Certification and Watchkeeping for Fishing Vessel Personnel, 1995* (Konvensi Internasional tentang Standar Pelatihan, Sertifikasi, dan Dinas Jaga Bagi Awak Kapal Penangkap Ikan, 1995). STCW-F 1995 (*Standards of Training, Certification and Watchkeeping for Fishing Vessel Personnel*) diberlakukan oleh IMO pada 29 September 2012, setelah setahun sebelumnya diratifikasi oleh 17 negara anggota, yaitu Kanada, Kongo, Denmark, Islandia, Kiribati, Latvia, Lithuania, Mauritania, Moroko, Namibia, Norwegia, Palau, Rusia, Sierra Leone, Spanyol, Syria, dan Ukraina.

Konvensi ini mengatur standar pendidikan dan pelatihan, sertifikasi awak kapal, dan tugas jaga pada kapal ikan. Diwajibkan untuk kapal dengan dimensi panjang 24 meter atau lebih. STCW-F 1995 melengkapi SFV *Torremolinos 1993* yang mengatur tentang konstruksi kapal ikan. Keduanya adalah instrumen internasional untuk keselamatan operasi penangkapan ikan.

Pekerjaan di kapal ikan bersifat 3d yaitu "kotor (dirty)", "berbahaya" (dangerous) dan "sulit (difficult)". ILO (International Labor Organization) pada tahun 1999 menyebutkan, tak kurang dari 24 ribu nyawa pelaut kapal ikan melayang setiap tahunnya. Dimana faktor kesalahan manusia (human error) berkontribusi sebesar

42 persen. Untuk memperkecil kecelakaan di atas, dibutuhkan pelaut kapal ikan yang memenuhi keahlian dalam keselamatan (safety), navigasi (navigation), dan pengoperasian kapal ikan (ship operation). Ini lah alasan utama yang mendorong diberlakukannya SCTW-F 1995.

Walaupun Indonesia bukan negara yang meratifikasi Konvensi SCTW-F 1995 di tahun 2011, namun sebagai anggota IMO, Indonesia tetap terikat saat konvensi tersebut diperlakukan (enter into force). Di Indonesia sendiri tercatat 2,2 juta orang pelaut kapal ikan, termasuk nelayan (KKP 2011). Jumlah ini jauh lebih banyak dibanding jumlah pelaut kapal niaga yang berkisar 300 ribu orang.

Jauh sebelum IMO mengadopsi SCTW-F 1995, Indonesia sebenarnya sudah memiliki regulasi pengawakan kapal ikan, yakni Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 9 Tahun 2005 tentang Pendidikan dan Pelatihan, Ujian Sertifikasi Pelaut Kapal Penangkap Ikan. Dimana keahlian para pelaut kapal ikan terbagi atas ANKAPIN (Ahli Nautika Kapal Ikan) dan ATKAPIN (Ahli Teknik Kapal Ikan).

BAB II

VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS

1. *Visi*

Visi didasarkan pada visi Indonesia 2045 yaitu mewujudkan Indonesia sebagai negara yang berdaulat, adil dan makmur. Visi Presiden 2020-2024 adalah “Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian, berlandaskan Gotong Royong”. Sebagai organisasi yang membantu Presiden untuk urusan kelautan dan perikanan, maka visi KKP 2020-2024 ditetapkan untuk mendukung terwujudnya Visi Presiden.

Visi KKP 2020-2024 adalah “Terwujudnya Masyarakat Kelautan dan Perikanan yang Sejahtera dan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan yang Berkelanjutan” untuk mewujudkan “Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian, berlandaskan Gotong Royong”.

Visi BRSDM pada tahun 2020-2024 adalah mendukung visi KKP yaitu “Terwujudnya Masyarakat Kelautan dan Perikanan yang Sejahtera dan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan yang Berkelanjutan” untuk mewujudkan Indonesia maju yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian, berlandaskan gotong-royong.

Visi Puslatluh KP pada tahun 2020-2024 adalah mendukung visi KKP dan visi BRSDM yaitu “Terwujudnya Masyarakat Kelautan dan Perikanan yang Sejahtera dan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan yang Berkelanjutan” untuk mewujudkan Indonesia maju yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian, berlandaskan gotong-royong.

Sejalan dengan Pusat pelatihan dan Penyuluhan KP, visi BPPP Tegal pada tahun 2020-2024 adalah menggunakan Visi BRSDM, yaitu “Terwujudnya Masyarakat Kelautan dan Perikanan yang Sejahtera dan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan yang Berkelanjutan” untuk mewujudkan Indonesia maju yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian, berlandaskan gotong-royong.

2. Misi

Untuk dapat berkontribusi dalam pencapaian visi Kementerian Kelautan dan Perikanan, maka BPPP Tegal menerapkan misi yang sama dengan Pusat Pelatihan dan Penyuluhan KP yang menjalankan misi Presiden, KKP dan BRSDM dalam bidang kelautan dan perikanan sebagai berikut:

1. Misi ke-1 yakni Peningkatan Kualitas SDM KP melalui Peningkatan kompetensi dan pendampingan dalam penerapan hasil inovasi riset Kelautan dan Perikanan;
2. Misi ke-2 yakni Struktur Ekonomi Yang Produktif, Mandiri, dan Berdaya Saing melalui pelatihan dan penyuluhan KP guna mendukung peningkatan Kontribusi Ekonomi Sektor Kelautan dan Perikanan terhadap Perekonomian Nasional;
3. Misi ke-4 yakni Mencapai Lingkungan Hidup Yang Berkelanjutan melalui pelatihan dan penyuluhan KP guna mendukung Sumber Daya Kelautan dan Perikanan yang lestari;
4. Misi ke-8 yakni Pengelolaan Pemerintahan yang Bersih, Efektif, dan Terpercaya melalui Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan di KKP.

Implementasi dari visi dan misi Presiden dilakukan secara bertanggungjawab berlandaskan gotong royong, sehingga saling memperkuat, memberi manfaat dan menghasilkan nilai tambah ekonomi, sosial dan budaya bagi kepentingan bersama.

3. Tujuan

Tujuan pelatihan dan penyuluhan kelautan dan perikanan yang merupakan penjabaran dari visi dan misi KKP yang ingin dicapai selama tahun 2020-2024 adalah sebagai berikut:

1. Menghasilkan SDM profesional dan berdaya saing guna mewujudkan pembangunan sektor KP berkelanjutan, didukung tata kelola pemerintahan yang bersih dan melayani.
2. Meningkatkan produktivitas, efisiensi usaha, pendapatan dan kesejahteraan pelaku utama dan pelaku usaha serta meningkatkan kesadaran dalam pelestarian fungsi lingkungan hidup melalui penyelenggaraan penyuluhan.
3. Meningkatkan pemanfaatan inovasi teknologi mendukung industrialisasi KP yang berdaya saing.
4. Terwujudnya tata Kelola pemerintahan yang baik di lingkup BPPP Tegal.

Tabel 2. Keterkaitan visi, misi dan tujuan dalam rencana kegiatan Puslatluh KP

Visi	Misi	Tujuan
<p>Terwujudnya Masyarakat Kelautan dan Perikanan yang Sejahtera dan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan yang Berkelanjutan melalui penyelenggaraan pelatihan dan penyuluhan untuk tercapainya peningkatan SDM KP kompeten</p>	<p>Misi 1. Peningkatan Kualitas SDM KP melalui Peningkatan kompetensi dan pendampingan dalam penerapan hasil inovasi riset Kelautan dan Perikanan</p>	<p>1. Menghasilkan SDM profesional dan berdaya saing guna mewujudkan pembangunan sektor KP berkelanjutan, didukung tata kelola pemerintahan yang bersih dan melayani.</p>
	<p>Misi 2. Struktur Ekonomi Yang Produktif, Mandiri, dan Berdaya Saing melalui pelatihan dan penyuluhan KP;</p>	<p>2. Meningkatkan produktivitas, efisiensi usaha, pendapatan dan kesejahteraan pelaku utama dan pelaku usaha serta meningkatkan kesadaran dalam pelestarian fungsi lingkungan hidup melalui penyelenggaraan penyuluhan.</p>
	<p>Misi 8. Pengelolaan Pemerintahan yang Bersih, Efektif, dan Terpercaya melalui Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan di KKP</p>	<p>3. Meningkatkan pemanfaatan inovasi teknologi mendukung industrialisasi KP yang berdaya saing.</p>
		<p>4. Menyelenggarakan fungsi kelembagaan dan menajerial riset dan SDM sesuai tata kelola pemerintahan yang baik</p>

4. Sasaran Strategis

Balai latluh Perikanan Tegal telah menetapkan Penetapan Kinerja yang berisikan Sasaran Strategis (SS) dan Indikator Kinerja Utama (IKU) berserta target dalam kurun waktu satu tahun anggaran yang telah disepakati antara Kepala Pusat Pelatihan Kelautan dan Perikanan dengan Kepala Balai Pelatihan dan Penyuluhan Perikanan Tegal. Penetapan Kinerja ini digunakan sebagai acuan kinerja BPPP Tegal dan sebagai pengukuran tingkat keberhasilan kerja selama satu tahun anggaran. Berikut adalah sasaran strategis BPPP Tegal :

1. Pendampingan kelompok pelaku usaha/utama dalam mendukung terwujudnya kesejahteraan masyarakat KP.
2. Kapasitas dan kompetensi SDM KP yang meningkat.
3. Tersedianya sarana dan prasarana pelatihan dan penyuluhan KP yang terstandar.
4. Terselenggaranya penyuluhan kelautan dan perikanan.
5. Terselenggaranya pelatihan SDM kelautan dan perikanan.
6. Tata Kelola pemerintahan yang baik lingkup BPPP Tegal.

- 4.1 Pendampingan kelompok pelaku usaha/utama dalam mendukung terwujudnya kesejahteraan masyarakat KP.

Mewujudkan masyarakat perikanan yang sejahtera melalui pendampingan kelompok oleh penyuluh perikanan adalah tujuan yang ingin dicapai BPPP Tegal pada masa kerja 5 tahun mendatang. Keberhasilan pencapaian tujuan ini ditandai dengan indicator kinerja sebagai berikut :

- a) 300 kelompok pada tahun 2021 menjadi 1.200 kelompok kelautan dan perikanan di satminkal BPPP Tegal yang meningkat kelasnya pada tahun 2024;
- b) 300 kelompok pada tahun 2021 menjadi 1.200 kelompok kelautan dan perikanan yang dibentuk pada tahun 2024;

- 4.2 Kapasitas dan kompetensi SDM KP yang meningkat.

Meningkatnya kompetensi SDM KP adalah tujuan utama pelatihan dan penyuluhan perikanan yang dilakukan oleh BPPP Tegal. Untuk mengetahui pencapaian tujuan itu, indicator yang digunakan selama 5 tahun mendatang adalah sebagai berikut:

- a) 1 desa/Kawasan pada tahun 2021 menjadi 4 desa/Kawasan mitra yang menerapkan iptek pada tahun 2024.
 - b) 60 persen pada tahun 2021 menjadi 75 persen lulusan pendidikan dan pelatihan yang terserap di dunia usaha dan dunia industry pada tahun 2024.
 - c) 38 orang pada tahun 2021 menjadi 168 orang lulusan pendidikan dan pelatihan yang membentuk start up (usaha rintisan) pada tahun 2024.
- 4.3 Tersedianya sarana dan prasarana pelatihan dan penyuluhan KP yang terstandar
- Sarana dan prasarana yang dimiliki balai diharapkan mampu menjawab kebutuhan akan pengetahuan dan keterampilan ilmu pengetahuan dan teknologi yang telah berkembang. Untuk itu indikator keberhasilan sebagai berikut :
- a) 1 unit/paket pada tahun 2021 menjadi 7 unit/paket sarana pelatihan dan penyuluhan KP yang terstandar pada tahun 2024.
 - b) 1 unit/paket pada tahun 2021 menjadi 7 unit/paket prasarana pelatihan dan penyuluhan KP yang terstandar pada tahun 2024.
- 4.4 Terselenggaranya penyuluhan kelautan dan perikanan.
- Peningkatan kompetensi SDM kelautan dan perikanan dilakukan salah satunya melalui kegiatan penyuluhan kelautan dan perikanan. Indikator keberhasilan kegiatan ini adalah sebagai berikut :
- a) 5.879 kelompok pada tahun 2021 menjadi 7.903 kelompok pelaku utama/pelaku usaha yang disuluh pada tahun 2024.
 - b) 1 percontohan padatahun 2021 menjadi 18 percontohan penyuluhan kelautan dan perikanan yang diterapkan pada tahun 2024.
- 4.5 Terselenggaranya pelatihan SDM kelautan dan perikanan.
- Peningkatan kompetensi SDM kelautan dan perikanan dilakukan salah satunya melalui kegiatan penyuluhan kelautan dan perikanan. Indikator keberhasilan kegiatan ini adalah sebagai berikut :
- a) 10.462 orang pada tahun 2021 menjadi 60.262 orang masyarakat kelautan dan perikanan yang dilatih pada tahun 2024.
 - b) 20 paket pada tahun 2021 menjadi 80 paket pelaksanaan pelatihan masyarakat berbasis "full online training" pada tahun 2024.

- c) 4 paket pada tahun 2021 menjadi 16 paket materi pelatihan berbasis kejiwidya pada tahun 2024.
- d) 90 orang pada tahun 2021 menjadi 7.590 orang SDM KP yang bersertifikat kompetensi pada tahun 2024.
- e) Tersertifikasinya BPPP Tegal sebagai lembaga pelatihan dan penyuluhan sesuai standar lembaga pelatihan setiap tahun.

4.6 Tata Kelola pemerintahan yang baik lingkup BPPP Tegal.

- a) Terselenggaranya 100% layanan dukungan manajemen internal pusat pelatihan dan penyuluhan KP setiap tahun.
- b) Rekonsiliasi kinerja BPPP Tegal sebesar 80 setiap tahun.
- c) BPPP Tegal telah menerapkan 84% pada tahun 2021 menjadi 90% system manajemen pengetahuan yang terstandar pada tahun 2024.
- d) Indeks profesionalitas ASN BPPP Tegal sebesar 73 pada tahun 2021 menjadi 76 pada tahun 2024.
- e) 100% telah menyelesaikan temuan LHP BPK setiap tahun.
- f) Nilai pelaksanaan anggaran BPPP Tegal sebesar 89 pada tahun 2021 menjadi 90 pada tahun 2024.
- g) Nilai kinerja anggaran BPPP Tegal sebesar 86 pada tahun 2021 menjadi 89 pada tahun 2024.

BAB III

ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI

1. *Arah Kebijakan dan Strategi Nasional*

Fokus RPJMN periode IV (2020-2024) dalam siklus RPJPN 2005-2025 adalah untuk menciptakan masyarakat Indonesia yang mandiri, maju, adil, dan makmur melalui percepatan pembangunan di berbagai bidang. Pembangunan tersebut diprioritaskan untuk memperkuat struktur perekonomian berlandaskan keunggulan kompetitif di berbagai wilayah yang didukung oleh sumber daya manusia berkualitas serta berdaya saing.

Sejak awal hingga triwulan pertama tahun 2020, hampir seluruh negara di dunia, termasuk Indonesia, telah terjangkit penyebaran pandemi *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19). Pandemi COVID-19 telah menimbulkan disrupsi pada kehidupan manusia, menyebabkan terjadinya penurunan aktivitas ekonomi di seluruh negara dan berakibat resesi di dunia. Dampak yang dirasakan Indonesia juga cukup besar dengan terganggunya mata rantai pasokan barang dan jasa, terganggunya mobilitas masyarakat, dan menurunnya kegiatan ekonomi khususnya pada sektor industri dan pariwisata yang berdampak pada meningkatnya angka pengangguran dan kemiskinan serta pada akhirnya menimbulkan penurunan pertumbuhan ekonomi nasional termasuk didalamnya sektor kelautan dan perikanan. Keadaan ini memerlukan pengendalian yang lebih komprehensif dan perlu adanya orientasi baru dalam perencanaan pembangunan pada tahun 2021, yang ditekankan pada pemulihan kehidupan masyarakat dan roda perekonomian untuk dapat kembali berjalan lancar, sesuai dengan tema RKP pada tahun 2021 adalah “Mempercepat Pemulihan Ekonomi dan Reformasi Sosial”.

RPJMN 2020-2024 telah mengarusutamakan Sustainable Development Goals (SDGs). Target-target dari 17 Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) beserta indikatornya telah menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam 7 agenda pembangunan Indonesia sebagai berikut:

1. Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan.

2. Agenda Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan & Menjamin Pemerataan.
3. Agenda Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing.
4. Agenda Membangun Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan.
5. Agenda Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi & Pelayanan Dasar.
6. Agenda Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana dan Perubahan Iklim.
7. Agenda Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik.

Dalam rangka melaksanakan Agenda Pembangunan Nasional (Prioritas Nasional) RPJMN 2020-2024, telah disusun Proyek Prioritas Strategis (Major Project) yang merupakan proyek yang memiliki nilai strategis dan daya ungkit tinggi untuk mencapai untuk mencapai sasaran prioritas pembangunan. Major Project di KKP yaitu Revitalisasi Tambak di Kawasan Sentra Produksi Udang dan Bandeng, dan Integrasi Pelabuhan Perikanan dan Fish Market Bertaraf Internasional. Selain itu KKP juga mendukung mayor project lainnya antara lain terkait dengan pariwisata dan Penguatan Jaminan Usaha Serta 350 Korporasi Petani dan Nelayan.

Strategi Agenda Pembangunan Nasional yang terkait dengan tugas KKP antara lain adalah :

1. Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan, yang meliputi Peningkatan pengelolaan kemaritiman, perikanan dan kelautan, memperkuat komitmen pelaksanaan target SDG 14 Ekosistem Lautan (Life Below Water), dan Peningkatan nilai tambah, lapangan kerja, dan investasi di sektor riil, dan industrialisasi.
2. Mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan, dengan strategi penguatan basis produksi dan pengolahan komoditas unggulan daerah yang tersebar pada sentra-sentra hilirisasi pertanian dan perikanan di Kawasan Perdesaan Prioritas Nasional (KPPN), kawasan transmigrasi, Pusat Kegiatan Strategis Nasional (PKSN), dan Sentra Kelautan Perikanan Terpadu (SKPT)/Wilayah Pengelolaan Perikanan (WPP);

3. Membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana dan perubahan iklim, dengan strategi konservasi kawasan dan perlindungan keanekaragaman hayati di daratan maupun pesisir, perlindungan kerentanan pesisir dan sektor kelautan, dan pengembangan rendah karbon pesisir dan laut.

2. *Arah Kebijakan dan Strategi Pembangunan KP*

Arah dan kebijakan pembangunan kelautan dan perikanan, adalah sebagai berikut :

1. Memperbaiki komunikasi dengan nelayan, evaluasi kebijakan, penyederhanaan izin, pengembangan pelabuhan, penangkapan ikan sampai dengan ZEE dan laut lepas, peningkatan pendapatan melalui akses permodalan, perlindungan dan perbaikan hidup nelayan. Arah kebijakan ini menjabarkan misi KKP yang terkait dengan Peningkatan Kontribusi Ekonomi sektor KP (DJPT)
2. Monev dan memperkuat perikanan budidaya untuk penyerapan lapangan kerja, peningkatan protein dan nilai tambah melalui akses permodalan, dan perlindungan usaha budidaya. Arah kebijakan menjabarkan misi KKP yang terkait dengan Peningkatan kontribusi ekonomi sektor KP (DJPB)
3. Membangkitkan industri kelautan dan perikanan melalui pemenuhan kebutuhan bahan baku industri, peningkatan kualitas mutu produk, penguatan sistem karantina ikan, peningkatan nilai tambah untuk peningkatan devisa. Arah kebijakan menjabarkan misi KKP yang terkait dengan Peningkatan kontribusi ekonomi sektor KP. (DJPDS, BKIPM).
4. Pengelolaan wilayah laut, pesisir dan pulau – pulau kecil serta penguatan pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan melalui koordinasi dengan instansi terkait Arah kebijakan menjabarkan misi KKP yang terkait dengan Peningkatan Kelestarian Sumber Daya Kelautan dan Perikanan. (PRL, PSDKP dan BKIPM).
5. Penguatan SDM dan inovasi riset kelautan dan perikanan.

Untuk mencapai 5 (lima) arah kebijakan diatas, KKP melaksanakan kebijakan tatakelola pemerintahan yang baik yang dilakukan oleh seluruh unit kerja di pusat dan daerah. Hal ini menjabarkan misi KKP terkait dengan Peningkatan tata kelola pemerintahan.

Strategi pelaksanaan arah kebijakan diatas adalah:

1. Memperbaiki komunikasi dengan nelayan, evaluasi kebijakan, penyederhanaan izin, pengembangan pelabuhan, penangkapan ikan sampai dengan ZEE dan laut lepas, peningkatan pendapatan melalui akses permodalan, perlindungan dan perbaikan hidup nelayan. Strategi yang akan dilaksanakan adalah:
 - a. Membuka komunikasi dengan stakeholder untuk harmonisasi kebijakan berbasis data, informasi dan pengetahuan yang faktual;
 - b. Perbaikan, penataan, dan penyederhanaan perizinan usaha di pusat dan daerah, termasuk sinergi dengan instansi lain yang terkait
 - c. Pengembangan pelabuhan perikanan prioritas di daerah, pelabuhan perikanan berwawasan lingkungan, dan pelabuhan perikanan yang terintegrasi dengan pasar ikan bertaraf internasional (Major Project RPJMN) dengan berkoordinasi dengan K/L terkait, pemerintah daerah dan badan usaha.
 - d. Eksplorasi perikanan di ZEE dan laut lepas.
 - e. Fasilitasi dan pengembangan skema pembiayaan yang murah dan mudah diakses, optimalisasi peran LPMUKP.
 - f. Peningkatan kesejahteraan, pemberdayaan nelayan, pemberdayaan kelompok nelayan perempuan, perlindungan usaha kelautan dan perikanan skala kecil, penguatan kelembagaan nelayan.
 - g. Penguatan kelompok usaha bersama melalui pembentukan korporasi nelayan (Major Project RPJMN) berkoordinasi dengan kementerian Koperasi dan UKM dan pemerintah daerah.
 - h. Pengembangan lembaga pengelola WPP dan penguatan data stok sumberdaya ikan.
 - i. Pengelolaan perikanan di Perairan Umum Daratan (PUD).
 - j. Pengembangan armada perikanan, alat penangkap ikan dan alat bantu penangkap ikan yang ramah lingkungan.
 - k. Partisipasi dalam organisasi pengelolaan perikanan regional yang melingkupi perairan indonesia (RFMOs).
 - l. Pengembangan kampung nelayan maju, bantuan premi asuransi nelayan, perluasan skema asuransi mandiri, Sertifikasi tanah nelayan.
 - m. Pengaturan akses nelayan terhadap pengelolaan sumberdaya, kemudahan fasilitasi usaha dan investasi, dan pengembangan perikanan berbasis digital.

- n. Pengembangan Sentra Kelautan Perikanan Terpadu (SKPT).
 - o. Penguatan Unit Pelaksana Teknis perikanan tangkap.
2. Perikanan budidaya dioptimalkan dan diperkuat untuk penyerapan lapangan kerja, peningkatan protein dan nilai tambah melalui akses permodalan, dan perlindungan usaha budidaya. Strategi yang akan dilaksanakan adalah:
- a. Akselerasi produk perikanan budidaya, ekstensifikasi lahan budidaya;
 - b. Pembangunan/revitalisasi tambak udang dan bandeng (Major Project RPJMN) berkoordinasi dengan K/L terkait, pemerintah daerah dan badan usaha;
 - c. Pengembangan perikanan budidaya air laut, payau dan tawar;
 - d. Pengembangan budidaya ikan hias, rumput laut, lobster;
 - e. Pengembangan pakan mandiri, pakan dari maggot;
 - f. Pembangunan fasilitas perbenihan, produksi induk unggul dan benih bermutu;
 - g. Pengelolaan kluster kawasan budidaya berkelanjutan;
 - h. Pengembangan kesehatan lingkungan budidaya dan pengujian residu produk perikanan budidaya untuk sertifikasi untuk ekspor;
 - i. Pelaksanaan sertifikasi cara budidaya Ikan yang Baik (CBIB), cara perbenihan ikan yang baik (CPIB), dan cara pembuatan pakan ikan yang baik (CPPIB);
 - j. Pembangunan dan penguatan sarana dan prasarana perikanan budidaya antara lain Balai Benih Ikan, unit perbenihan, dan Broodstock center;
 - k. Pembangunan dan penguatan infrastruktur perikanan budidaya antara lain meliputi tambak, kolam, saluran irigasi tambak, keramba jaring apung dan lain-lain;
 - l. Sertifikasi lahan dan asuransi usaha perikanan budidaya;
 - m. Penataan perizinan usaha budidaya pusat dan daerah, fasilitasi usaha dan investasi, dan sinergi perizinan dengan instansi terkait;
 - n. Pengembangan Sentra Kelautan Perikanan Terpadu (SKPT); dan
 - o. Penguatan UPT perikanan budidaya.
3. Membangkitkan industri kelautan dan perikanan melalui pemenuhan kebutuhan bahan baku industri, peningkatan kualitas mutu produk, penguatan sistem karantina ikan, peningkatan nilai tambah untuk peningkatan devisa. Strategi yang akan dilaksanakan adalah:

- a. Perbaiki kualitas, kapasitas, dan produktifitas industri pengolahan;
- b. Meningkatkan produksi, produktifitas, standardisasi, jaminan mutu dan keamanan produk kelautan dan perikanan;
- c. Penataan rantai pasok hasil perikanan dalam koridor logistik, penguatan sistem logistik ikan yang efisien, pemetaan dan pemantauan logistik hasil perikanan, Pemetaan logistik hasil Perikanan di daerah;
- d. Pembinaan pelaku usaha perikanan dalam rangka pengadaan dan penyimpanan hasil perikanan, penguatan daya saing Unit Pengolah Ikan (UPI);
- e. Pembinaan pelaku usaha perikanan dan penyedia layanan jasa logistik dalam rangka distribusi dan transportasi hasil perikanan;
- f. Peningkatan sarana prasarana pengadaan dan penyimpanan ikan;
- g. Pelaksanaan Kampanye Gerakan Memasyarakatkan Makan Ikan untuk peningkatan konsumsi ikan masyarakat dalam rangka mengatasi stunting;
- h. Perluasan akses pasar dalam dan luar negeri, pengembangan sistem pemasaran produk berbasis digital, peningkatan promosi produk kelautan dan perikanan untuk skala internasional, penguatan branding produk perikanan kelautan Indonesia, pemetaan dan strategi akses pasar negara tujuan ekspor;
- i. Pembinaan dan Pengelolaan Pasar Ikan, Pembangunan fasilitas pemasaran perikanan skala internasional (Mayor Project) K/L terkait, pemerintah daerah dan badan usaha;
- j. Pemetaan preferensi, konsumsi dan kebutuhan ikan konsumen dalam negeri;
- k. Peningkatan Partisipasi daerah dalam mendukung pemasaran produk kelautan dan perikanan;
- l. Penyusunan Rancangan Standar Nasional Indonesia (RSNI) produk hasil KP, sertifikasi kelayakan pengolahan (SKP), sertifikasi SNI produk kelautan dan perikanan;
- m. Peningkatan unit penanganan dan unit pengolahan produk hasil KP;
- n. Pemenuhan kebutuhan bahan baku serta peningkatan nilai tambah UPI menuju zero waste;
- o. Penyediaan dan peningkatan sarana dan prasarana sistem rantai dingin dan peralatan pengolahan;

- p. Peningkatan ragam baru produk hasil kelautan dan perikanan, hilirisasi industri rumput laut dan sumber daya alam laut bernilai tambah;
 - q. Fasilitasi kemudahan pelaku usaha dan investasi, pembiayaan, teknologi dan pasar dan didukung regulasi yang kondusif;
 - r. Pelaksanaan uji terap produk inovasi teknologi pengolahan dan pemasaran hasil kelautan dan perikanan
 - s. Harmonisasi sistem jaminan mutu dan keamanan hasil perikanan serta penanganan kasus mutu ekspor impor produk perikanan, penerapan standardisasi mutu, sertifikasi dan ketelusuran produk (traceability), peningkatan sarana dan prasarana pengujian mutu;
 - t. Pengembangan Sentra Kelautan Perikanan Terpadu (SKPT);
 - u. Penguatan UPT mutu hasil perikanan dan karantina ikan.
4. Pengelolaan wilayah laut, pesisir dan pulau-pulau kecil serta penguatan pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan melalui koordinasi dengan instansi terkait. Strategi yang akan dilaksanakan adalah:
- a. Pengelolaan ekosistem kelautan dan pemanfaatan jasa kelautan secara berkelanjutan termasuk penanganan pencemaran laut dan sampah plastik;
 - b. Peningkatan manajemen dan pemanfaatan kawasan konservasi perairan secara berkelanjutan
 - c. Peningkatan pengelolaan keanekaragaman hayati perairan yang dilindungi, dilestarikan dan/atau dimanfaatkan
 - d. Peningkatan pengelolaan pulau-pulau kecil/terluar
 - e. Peningkatan produksi dan usaha garam nasional, ekstensifikasi dan intensifikasi lahan garam, peningkatan kualitas garam
 - f. Pembangunan sarana prasarana di kawasan wisata bahari
 - g. Peningkatan jasa kelautan yang dikelola untuk pengembangan ekonomi
 - h. Penguatan kelembagaan, masyarakat hukum adat, tradisional dan lokal di Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang diakui.
 - i. Pengelolaan Biofarmakologi dan peningkatan pemanfaatan marine bioproduct dan bioteknologi, pengembangan rendah karbon pesisir dan laut.
 - j. Fasilitasi perizinan pengelolaan perairan
 - k. Pengelolaan dan penataan ruang laut dan rencana zonasi pesisir, Penyusunan RZ kawasan, KSN, KSNT yang ditetapkan oleh Peraturan Perundangan dan Rencana Aksi pengelolaan ruang laut

- l. Penyelesaian rencana zonasi laut, pengendalian pemanfaatan ruang laut dan pulau-pulau kecil, termasuk penyelarasan RZWP3K dan RTRW Provinsi;
 - m. Pemberantasan IUU Fishing dan destructive fishing;
 - n. Operasi armada pengasawan SDKP, operasional kapal pengawas, speed boat/RIB/rubber boat pengawas, operasi pencegatan (intercept) secara terintegrasi, kerjasama operasi pengawasan di laut;
 - o. Pengendalian dan pengawasan SDKP yang profesional dan partisipatif
 - p. Penegakan hukum di bidang kelautan dan perikanan, penguatan Satgas pemberantasan Illegal Fishing.
 - q. Pengawasan terhadap pelaku usaha kelautan dan perikanan yang diperiksa kepatuhannya
 - r. Penyadartahuan masyarakat KP dalam pemanfaatan sumber daya perikanan yang tertib dan bertanggungjawab
 - s. Operasional Pengawasan ekspor, impor dan domestik
 - t. Harmonisasi Sistem Perkarantinaan dan Keamanan Hayati Ikan dalam dan luar Negeri, sinergi pengawasn lalu lintas ikan, pelayanan tindak karantina di entry dan exit point serta pos lintas batas (gateway) wilayah perbatasan
 - u. Peningkatan sarana dan prasarana pengawasan dan karantina ikan
 - v. Pengembangan Sentra Kelautan dan Perikanan Terpadu (SKPT)
 - w. Peningkatan UPT Pengelolaan Ruang Laut, Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan dan Karantina Ikan.
5. Penguatan SDM dan inovasi riset kelautan dan perikanan. Strategi yang akan dilaksanakan adalah:
- a. Penguatan kegiatan riset yang dimanfaatkan oleh masyarakat, inovasi teknologi dan riset kemaritiman, kelautan dan perikanan, serta peningkatan database kelautan dan perikanan;
 - b. Peningkatan kualitas riset mendukung program utama KKP
 - c. Penerapan Teknologi Adaptif Lokasi (TAL) Hasil Riset, diseminasi teknologi perikanan dan kelautan yang berkelanjutan dan produktif;
 - d. Pengembangan/pembentukan pusat unggulan riset kelautan dan perikanan;
 - e. Pengembangan, pendidikan, pelatihan dan penyuluhan, termasuk yang berbasis digital;

- f. Pengembangan kewirausahaan perikanan, pengembangan angkatan kerja perikanan generasi milenial, peningkatan daya saing SDM kelautan dan perikanan melalui diklat agar dapat terserap di Dunia Usaha dan Dunia Industri serta membentuk startup (usaha rintisan), penguatan literasi maritim;
- g. Pelatihan masyarakat kelautan dan perikanan yang bersertifikasi kompetensi;
- h. Pembentukan kelompok kelautan dan perikanan mandiri;
- i. Penguatan pendidikan vokasi kelautan dan perikanan;
- j. Peningkatan sarana dan prasarana riset, pendidikan, pelatihan dan penyuluhan kelautan dan perikanan;
- k. Peningkatan UPT riset, pendidikan, pelatihan, dan penyuluhan kelautan dan perikanan.

Arah Kebijakan Pengarusutamaan pembangunan kelautan dan perikanan tahun 2020-2024 adalah:

1. Tujuan Pembangunan Berkelanjutan;
2. Gender;
3. Modal Sosial Budaya;
4. Transformasi Digital.

Pengarusutamaan dalam Dokumen Rencana Kegiatan Tahun 2020-2024 KKP mengacu pada Dokumen RPJMN 2020-2024 yang telah menetapkan 4 (empat) pengarusutamaan (*mainstreaming*) sebagai bentuk pembangunan inovatifadaptif, sehingga dapat menjadi katalis pembangunan untuk menuju masyarakat sejahtera dan berkeadilan. Keempat *mainstreaming* ini akan mewarnai dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam pembangunan sektor dan wilayah, dengan tetap memperhatikan kelestarian lingkungan dan memastikan pelaksanaannya secara inklusif. Selain mempercepat pencapaian target-target dari fokus pembangunan, pengarusutamaan ini juga bertujuan untuk memberikan akses pembangunan yang merata dan adil dengan meningkatkan efisiensi tata kelola dan juga adaptabilitas terhadap faktor eksternal lingkungan.

a. Tujuan Pembangunan Berkelanjutan

TPB/SDGs mencakup 17 Tujuan/Goal, 169 target, dan 241 indikator. Dalam melaksanakan TPB/SDGs, diperlukan keterkaitan antardimensi pembangunan yang saling berpengaruh. Dimensi pembangunan yang dimaksud meliputi dimensi sosial, ekonomi, dan lingkungan, yang merupakan satu kesatuan yang tidak dapat terpisahkan

KKP akan memperkuat komitmen pelaksanaan target TPB 14 Ekosistem Lautan (Life Below Water yang mencakup diantaranya (1) mengurangi pencemaran laut termasuk sampah laut, (2) mengelola dan melindungi ekosistem laut dan pesisir secara berkelanjutan, (3) meminimalisasi dan mengatasi dampak pengasaman laut, (4) mengatur kuota penangkapan per wilayah agar sumber daya ikan tetap berkelanjutan, (5) melestarikan wilayah pesisir dan laut, (6) mengatur subsidi perikanan agar tidak berkontribusi terhadap kelebihan kapasitas dan penangkapan ikan berlebih, (7) meningkatkan manfaat ekonomi atas pemanfaatan berkelanjutan sumber daya laut termasuk melalui pengelolaan perikanan, budidaya air dan pariwisata berkelanjutan, (8) meningkatkan pengetahuan ilmiah, mengembangkan kapasitas penelitian dan alih teknologi kelautan, (9) menyediakan akses untuk nelayan skala kecil terhadap sumber daya laut dan pesisir, dan (10) meningkatkan pelestarian dan pemanfaatan berkelanjutan lautan dan sumber dayanya dengan menetapkan hukum internasional yang tercermin dalam the United Nation Convention on the Law of the Sea (UNCLOS).

b. Gender

Pengarusutamaan gender diarahkan untuk mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender di berbagai sektor dalam pembangunan, dengan strategi meningkatkan peran, akses, kontrol dan manfaat gender dalam pembangunan kelautan dan perikanan. Strategi yang akan dilakukan adalah percepatan pelaksanaan pengarusutamaan gender di semua bidang pembangunan di tingkat pusat, dan daerah, yang mencakup: (a) Penguatan 7 prasyarat PUG: komitmen, kebijakan, kelembagaan, sumber daya, data terpilah, alat analisis, partisipasi masyarakat. (b) Penerapan Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender (PPRG); (c) Penyiapan roadmap PUG; (d) Pengembangan

model pelaksanaan PUG terintegrasi antar unit eselon I di KKP dan antar pusat-daerah; (g) Pembuatan profil gender; (h) Monitoring dan evaluasi serta pengawasan Pengarusutamaan Gender (PUG) KKP.

c. Modal Sosial Budaya

Pengarusutamaan modal sosial budaya merupakan internalisasi nilai dan pendayagunaan kekayaan budaya untuk mendukung seluruh proses pembangunan. Pengetahuan tradisional (local knowledge), kearifan local (local wisdom), pranata sosial di masyarakat sebagai penjelmaan nilai-nilai sosial budaya komunitas harus menjadi pertimbangan dalam proses perencanaan serta penyusunan kebijakan dan program pembangunan nasional. Pengarusutamaan sosial-budaya ini bertujuan dan berorientasi pada penghargaan atas khazanah budaya masyarakat, sekaligus upaya pelestarian dan pemajuan kebudayaan bangsa.

Pembangunan kebudayaan ingin memastikan bahwa setiap penduduk memperoleh perlindungan hak kebudayaan dan kebebasan berekspresi untuk memperkuat kebudayaan yang inklusif. Peningkatan pembangunan inklusif dan berwawasan budaya lingkup KKP, diantaranya adalah (1) Pelaksanaan pembangunan yang mengindahkan nilai budaya, kearifan lokal dan keragaman SDA hayati, (2) Pengembangan dan penguatan budaya bahari dan literasi bahari, dan (3) Pemberdayaan masyarakat adat pesisir dan pulau-pulau kecil.

d. Transformasi Digital

Pengarustamaan transformasi digital merupakan upaya untuk mengoptimalkan peranan teknologi digital dalam meningkatkan daya saing bangsa dan sebagai salah satu sumber pertumbuhan ekonomi Indonesia ke depan. Strategi pengarustamaan transformasi digital terdiri dari aspek pemantapan ekosistem (supply), pemanfaatan (demand) dan pengelolaan big data

Penyiapan layanan digital terintegrasi lingkup KKP yang mencakup penyiapan regulasi, penguatan kelembagaan, pembangunan jaringan, sarpras, meningkatkan kapasitas SDM dengan keahlian digital, melakukan kerja sama untuk menyediakan layanan digital dan one data serta penataan sistem perizinan berbasis web (on-line), termasuk penerapan Sistem Pemerintah Berbasis

Elektronik (SPBE) KKP dan peningkatan usaha kelautan dan perikanan melalui e-commerce.

3. *Arah Kebijakan dan Strategi BRSDM KP*

Arah kebijakan BRSDM KP 2020-2024 mengacu pada arah kebijakan pembangunan kelautan dan perikanan nasional (RPJMN) dan arah kebijakan pembangunan KP yang ada. Berdasarkan penjabaran strategi pembangunan KP 2020 – 2024, strategi penguatan daya saing SDM, inovasi teknologi dan riset merupakan prioritas utama BRSDM KP yang diperoleh dari hasil analisis SWOT. Upaya yang akan dilaksanakan untuk memenuhi hal tersebut diantaranya adalah:

1. Menyelenggarakan riset untuk menyelesaikan isu dan permasalahan.
2. Meningkatkan peran riset serta inovasi teknologi dalam mendukung percepatan pembangunan kelautan dan perikanan.
3. Meningkatkan diseminasi hasil riset sesuai dengan upaya pengembangan industri kelautan dan perikanan.
4. Membangun hubungan melalui jaringan kemitraan dalam kerangka kerjasama riset dan industri.
5. Mengembangkan sistem pendidikan vokasi dan pelatihan sesuai kebutuhan dunia usaha dan dunia industri (DUDI).
6. Meningkatkan kompetensi ASN KP yang unggul dan berdaya saing global.
7. Membangun sistem pendidikan, pelatihan dan penyuluhan berbasis digital.
8. Membangun sistem penyuluhan yang bersinergi dengan riset dan pengembangan SDM.
9. Memperkuat kelembagaan dan manajerial riset dan SDM.

4. *Arah Kebijakan dan Strategi Puslatluh KP*

Kebijakan yang dilaksanakan Pusat Pelatihan dan Penyuluhan dalam mendukung peran BRSDM dalam pembangunan kelautan dan perikanan, diantaranya yaitu:

A. *Pelatihan KP*

Pelatihan kelautan dan perikanan diselenggarakan melalui pelatihan bagi masyarakat dan aparatur. Pelatihan bagi masyarakat ditujukan kepada nelayan, pembudidaya, pengolah, dan pedagang ikan, serta masyarakat kelautan dan

perikanan lainnya. Sedangkan diklat bagi aparatur ditujukan bagi aparatur negara yang memiliki peran, partisipasi dan kontribusi dalam pembangunan kelautan dan perikanan, baik aparatur di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan, maupun aparatur di tingkat Provinsi/Kabupaten/Kota. Diklat aparatur terdiri dari diklat prajabatan dan diklat dalam jabatan, yaitu diklat teknis, struktural, dan fungsional.

Kegiatan ini pada dasarnya lebih ditujukan bagi peningkatan kompetensi masyarakat KP agar dapat meningkatkan produksi dan produktivitas usaha dan taraf kehidupannya. Pelatihan bagi aparatur Kementerian Kelautan dan Perikanan dan aparatur daerah yang membidangi kelautan dan perikanan, ditujukan untuk menyiapkan SDM aparatur yang memiliki kompetensi teknis dan manajerial, serta sebagai fasilitator bagi kepentingan para pelaku utama. Arah pelatihan KP yang dilaksanakan antara lain :

- a. Mengembangkan Sistem pelatihan berbasis Standar Kompetensi Nasional (SKKNI) dan Standar Internasional melalui penerapan Konvensi STCW-F 1995;
- b. Melakukan akreditasi program dan lembaga pelatihan KP;
- c. Mengembangkan sistem sertifikasi kompetensi SDM KP;
- d. Mengembangkan jejaring kerja pelatihan dan pemberdayaan lulusan pelatihan kelautan dan perikanan;
- e. Mengembangkan metode pelatihan dengan pendekatan inkubator bisnis berbasis digital talent untuk menghasilkan startup di bidang kelautan dan perikanan;
- f. Memanfaatkan teknologi informasi dalam rangka memperluas jangkauan layanan pelatihan (online training).

Tahun 2024 ditargetkan Pelatihan berstandar SKKNI & Internasional sejalan dengan target output 1 juta sertifikasi kompetensi dengan langkah langkah seperti menyusun kurikulum dan modul standar nasional dan internasional guna memenuhi Persyaratan kompetensi tenaga kerja global. Selain itu di tahun 2024 juga beberapa Balai Latluh Perikanan Tegal ditargetkan sudah menjadi Badan Layanan Umum (BLU).

Balai balai akan diinisiasi menjadi *training centre* yang spesifik seperti training centre mekanisasi, training centre budidaya dan lain sebagainya. Selanjutnya akan dibuat pola container standar berisi peralatan lengkap untuk melayani kebutuhan pelatihan-pelatihan teknis di sentra-sentra masyarakat, sebagai mobile *training*

center melibatkan alumni satuan pendidikan Kelautan dan Perikanan sebagai pelatih/instruktur. *Mobile training center* dapat berisi pelatihan penangkapan, permesinan, pengolahan dan budidaya.

Langkah operasional yang akan dilakukan adalah (a) Pelatihan Kelautan dan Perikanan berbasis kompetensi, (b) Sertifikasi dan akreditasi pelatihan (c) Peningkatan kompetensi peserta pelatihan (aparatur dan non aparatur). Kegiatan pelatihan yang dilakukan dalam mendukung program kementerian di antaranya adalah pelatihan pada masyarakat pelaku utama dan usaha.

Pelatihan dimaksudkan untuk Pemberdayaan masyarakat dalam jangka panjang dan mempunyai arah untuk: (a) peningkatan kemandirian masyarakat melalui pengembangan kegiatan ekonomi, peningkatan kualitas sumber daya manusia, partisipasi masyarakat, penguatan modal dan penguatan kelembagaan masyarakat, (b) peningkatan kemampuan masyarakat untuk mengelola dan memanfaatkan sumber daya secara optimal dan berkelanjutan sesuai dengan kaidah kelestarian lingkungan, (c) pengembangan kemitraan dengan lembaga swasta dan pemerintah.

Pelatihan diarahkan untuk mendukung isu-isu strategis nasional sektor KP, antara lain:

- 1) Menyusun rencana aksi dan tindak lanjut Permen KP tentang Lobster, memerlukan ketersediaan kurikulum dan modul pelatihan budidaya lobster;
- 2) Dukungan pelatihan terhadap strategi peningkatan produksi budidaya udang, dengan menyiapkan kurikulum dan modul pelatihan budidaya udang, pelatihan pembuatan pakan, dan membangun sdm budidaya udang;
- 3) Strategi pencegahan dan penyebaran sampah plastik, pelatihan penanganan dan pengelolaan sampah plastik;
- 4) Membuat prototipe miniplant solar refrigeraton, yaitu membuat pabrik es sederhana (berfungsi sebagai cold storage dan ice flake machine) dengan sumber energi tenaga surya untuk diintegrasikan sebagai sarana pengawetan produk perikanan disentra-sentra pemasaran ikan;
- 5) Pelatihan kepada pelaku utama penerima bantuan pemerintah dari eselon I teknis, sebagai upaya untuk mengefektifkan bantuan bantuan yang telah diterima oleh masyarakat;

- 6) Pelatihan lainnya nanti yang dibutuhkan untuk mendukung isu-isu strategis nasional yang ada di sektor kelautan dan perikanan;
- 7) Pelatihan aparatur juga diarahkan kepada jenis-jenis pelatihan online atau e-learning. Dengan memanfaatkan teknologi digital, diharapkan Pusat Pelatihan dan Penyuluhan dapat menjangkau lebih jauh dengan jumlah yang lebih masif untuk peningkatan kompetensi aparatur yang ada di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan. Saat ini Balai Diklat Aparatur Sukamandi sudah mengembangkan sistem untuk pelatihan online aparatur KP. Sarana prasarana pendukungnya juga sudah ditingkatkan dengan menguatkan jaringan di BDA Sukamandi.

B. Penyuluhan KP

Kegiatan penyuluhan berdasarkan kepada metoda dan materi penyuluhan yang partisipatif dan inovatif dilaksanakan melalui:

- 1) Peningkatan kemandirian melalui penguatan kelembagaan pelaku utama dan pelaku usaha kelautan dan perikanan (penumbuhan kelompok, peningkatan kelas kelompok)
- 2) Peningkatan skala usaha pelaku utama dan pelaku usaha kelautan dan perikanan (UMKM dan Koperasi)
- 3) Peningkatan akses informasi dan teknologi, akses pasar, dan akses permodalan
- 4) Peningkatan kolaborasi Penyuluhan dengan Pendidikan, Pelatihan dan Riset dalam sinergi pendidikan, pemanfaatan hasil kajiwiwida, dan diseminasi hasil riset terekomendasi kepada masyarakat pelaku utama dan pelaku usaha sektor kelautan dan perikanan.

Penataan kembali sistem penyelenggaraan penyuluhan, terutama pasca terbitnya Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah daerah, dimana kewenangan penyelenggaraan penyuluhan menjadi kewenangan pusat, dalam hal ini Kementerian Kelautan dan Perikanan. Penyuluhan kelautan dan perikanan dilaksanakan dengan fokus kepada ketenagaan, kelembagaan, penyelenggaraan penyuluhan, pembinaan dan pengawasan, pembiayaan dan sarana prasarana penyuluhan.

Kegiatan Penyuluhan Kelautan dan Perikanan dibagi dalam 4 (empat) kelompok kegiatan, meliputi:

- a. Pengembangan dan Penataan Kelembagaan dan Ketenagaan;
 - Peningkatan kelas kelompok mandiri
 - Percontohan dan pengembangan kelembagaan penyuluhan pusat di daerah
 - Penempatan dan penyebaran penyuluh di sekretariat penyuluhan di kab/kota
 - Membuat piramida model penyuluh (PNS, PPB dan Penyuluh Swadaya)
- b. Peningkatan Kapasitas Penyuluh;
 - Peningkatan daya saing penyuluh PNS
 - Pengembangan dan pembinaan penyuluh perikanan bantu (PPB)
 - Pembinaan Penyuluh Perikanan swadaya
- c. Pengembangan Penyelenggaraan Penyuluhan berbasis digital;
 - Pengembangan materi cyber extention
 - Peningkatan kualitas dan kuantitas media penyuluhan berbasis inovasi dan teknologi
 - Pengembangan penyuluhan wilayah potensi perikanan (mapping)
 - Membangun Sistem Penyuluhan Digital, yang memuat sistem absensi, sistem pelaporan kinerja, dan sistem konsultasi/ pendampingan
 - Membangun sistem penilaian kinerja penyuluh PNS, P3K & Swadaya berbasis lokasi (gps)
 - Membangun standar digital library, dengan memuat modul-modul yang lengkap sehingga penyuluhan dapat menjadi *Pool knowledge*
- d. Pengembangan dan Penataan Sarana dan Prasarana Penyuluhan;
 - Penataan sarana dan prasarana penyuluhan
 - Pengelolaan Balai/Pos/Satker Penyuluhan
 - Pengembangan sarana dan prasarana penyuluhan
- e. Pembinaan, Pengendalian dan Pengawasan Penyuluhan
 - Pembinaan reorientasi penyuluh berbasis kinerja
 - Peningkatan sistem evaluasi dan monitoring penyuluh
 - Pengembangan sistem pengawasan penyuluhan interkoneksi

Berkaitan dengan agenda peningkatan kompetensi pelaku utama dan pelaku usaha sebagai pilar pembangunan ekonomi berbasis kelautan dan perikanan, disusun **4 (empat) sasaran pokok** dengan prioritas dan arah kebijakan sebagai berikut:

- 1) **Sasaran Pertama** Penguatan Kelembagaan Ekonomi Pelaku Utama dan Pelaku Usaha Perikanan. Untuk mencapai sasaran tersebut prioritas pengembangan diletakkan pada: (1) Perencanaan partisipatif; (2) Pelatihan dan pendampingan; (3) Tahap peningkatan skala usaha kelompok menuju UMKM KP unggulan (4) Tahap penumbuhan kelompok usaha mandiri; (5) Tahap pematangan kelompok; (6) Tahap pengembangan kelompok; dan (7) Kegiatan pendampingan kelompok atau gabungan kelompok pada tahap pra-produksi, produksi, dan diversifikasi produk.
- 2) **Sasaran Kedua** Peningkatan Penguasaan Manajemen Usaha, Teknologi dan penjaminan mutu produksi. Untuk mencapai sasaran tersebut prioritas pengembangan diletakkan pada: (1) Penguasaan kelompok masyarakat mitra terhadap manajemen usaha; (2) Penguasaan masyarakat mitra terhadap teknologi produksi; (3) Peningkatan mutu dan nilai tambah; (4) Segmentasi pasar dan preferensi konsumen; dan (5) Pengawasan mutu produk.
- 3) **Sasaran Ketiga** Pengembangan Permodalan. Untuk mencapai sasaran tersebut prioritas pengembangan diletakkan pada: (1) Mobilisasi dana bersama dalam kelompok; (2) Bimbingan pengelolaan dana bersama; dan (3) Bimbingan pengenalan sumber-sumber permodalan.
- 4) **Sasaran Keempat** Pengenalan dan Perluasan Pasar. Untuk mencapai sasaran tersebut prioritas pengembangan diletakkan pada: (1) Pengenalan kelompok atau gabungan kelompok kepada akses pasar lokal; (2) Pengenalan pada pasar regional maupun internasional; dan (3) Pengenalan kelompok pada diversifikasi produk.

C. **Kerjasama Pelatihan dan Penyuluhan SDM KP**

Kerjasama program pelatihan dan penyuluhan KP bertujuan meningkatkan pelayanan penyelenggaraan pelatihan dan penyuluhan dengan stakeholder. Kerjasama dilakukan dapat dilakukan dengan perguruan tinggi, Kementerian/lembaga, Pemerintah Daerah, NGO atau LSM, Dunia Usaha/industri, lembaga dalam dan luar negeri, individu yang mempunyai korelasi dengan pelatihan dan penyuluhan serta stakeholder lainnya.

Kerjasama penyelenggaraan pelatihan diarahkan pada Open Resources dengan membangun Sistem Pelatihan dengan melibatkan dunia usaha dan industri

(hightech recomanded) serta menyusun kurikulum dan modul dengan melibatkan pakar expert (pakar). Menjaring kerjasama peningkatan kompetensi instruktur & widyaiswara, melalui pemagangan luar negeri (3 – 6 bln/1 th) bekerja sama dengan BUMN dan industri global lainnya.

Agenda kerjasama pelatihan dan penyuluhan dalam mengembangkan sistem pelatihan KP, sasaran pokok dengan prioritas dan arah kebijakan sebagai berikut:

A. Sasaran Pertama

Terpenuhinya modal usaha kelompok yang digali dari anggota kelompok itu sendiri, donatur perorangan, pemerintah daerah, lembaga donor dalam dan luar negeri, lembaga keuangan maupun perusahaan dalam rangka pemanfaatan dana tanggungjawab sosial masyarakat (CSR). Untuk mencapai sasaran tersebut prioritas pengembangan diletakkan pada: (1) Membuat kriteria seleksi calon anggota kelompok; (2) Sosialisasi paket-paket pelatihan unggulan dalam rangka meningkatkan pendapatan pelaku utama/ dan atau pelaku usaha; (3) Menjual paket pelatihan sertifikasi dalam rangka menyiapkan tenaga kerja siap pakai; (4) Sosialisasi paket pelatihan dalam rangka mendukung isu pemanasan global dan degradasi ekosistem pesisir; dan (5) Melakukan kerjasama antara lembaga pelatihan, lembaga sertifikasi profesi, dan lembaga penempatan kerja.

B. Sasaran Kedua

Terpenuhinya sarana pelatihan dan penyuluhan dari sumber-sumber pembiayaan seperti tersebut pada sasaran pertama. Untuk mencapai sasaran tersebut prioritas pengembangan diletakkan pada: (1) Memperluas jejaring kerjasama yang komplementer dan saling menguntungkan dalam rangka pemenuhan sarana pelatihan dan penyuluhan tertentu yang bersumber dari pemerintah daerah maupun sumber-sumber lain dalam negeri; dan (2) Mencari dana hibah luar negeri dari lembaga donor negara sahabat dalam rangka pemenuhan sarana pelatihan dan penyuluhan terkini.

C. Sasaran Ketiga

Peningkatan kapasitas SDM-KP melalui pembiayaan yang bersumber dari non APBN KKP. Untuk mencapai sasaran tersebut prioritas pengembangan diletakkan pada: (1) Memperluas jejaring kerjasama antara lembaga pelatihan dengan berbagai lembaga donor di luar negeri dalam rangka hibah pelatihan maupun penyuluhan; dan

(2) Kerjasama antar lembaga pelatihan dan penyuluhan di luar sektor perikanan dalam rangka peningkatan kompetensi antar pengelola pelatihan dan penyuluhan kedua belah pihak.

5. Arah Kebijakan dan Strategi BPPP Tegal

Kebijakan yang dilaksanakan oleh BPPP Tegal haruslah selaras dengan kebijakan yang telah ditentukan oleh BRSDM KP dan Puslatluh KP. Kebijakan yang akan dilaksanakan yaitu:

1. Pelayanan Kegiatan Pelatihan KP Dalam Rangka Peningkatan Kompetensi SDM KP.

BPPP Tegal terus berupaya untuk terus meningkatkan pelayanan dan kualitas pelatihan dan penyuluhan kelautan dan perikanan kepada masyarakat KP atau pengguna jasa. Pelaksanaan pelatihan kelautan dan perikanan akan dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan kompetensi masyarakat KP di lapangan. Sasaran pelatihan harus tepat sasaran sesuai kebutuhan. Sebagai dasar pelaksanaan pelatihan kelautan dan perikanan yang sesuai sasaran kebutuhan kompetensi, BPPP Tegal melaksanakan pelatihan dengan dasar sebagai berikut:

- a. Program dan daerah prioritas kebijakan pengembangan kelautan dan perikanan yang telah ditentukan oleh kementerian kelautan dan perikanan.
- b. Masyarakat penerima bantuan sarana dan prasarana program kebijakan Direktorat Teknis KKP.
- c. Identifikasi kebutuhan pelatihan yang diajukan oleh pemerintah daerah.
- d. Kerjasama dengan pemerintah daerah atau swasta.
- e. Swadaya masyarakat.

2. Peningkatan Kompetensi SDM KP Melalui Kerjasama

kerjasama dalam kegiatan pelatihan kelautan dan perikanan direalisasikan dalam bentuk kegiatan pelatihan dan pemanfaatan sarana dan prasarana dalam rangka peningkatan kompetensi SDM KP.

3. Peningkatan Kompetensi Masyarakat KP Melalui Penyuluhan KP

Selain pelatihan, peningkatan kompetensi masyarakat KP juga dapat dilakukan dengan kegiatan penyuluhan KP.

Strategi pencapaian sasaran kegiatan pelatihan dan penyuluhan BPPP Tegal adalah sebagai berikut:

a. Penguatan kelembagaan

Penguatan kelembagaan dilakukan dengan mensinergikan unit-unit kerja di BPPP Tegal sehingga pelaksanaan kegiatan pelatihan dan penyuluhan KP dapat terlaksana dengan baik. Penempatan SDM yang tepat pada unit-unit kerja juga dapat berkontribusi dalam menghasilkan pelayanan yang baik kepada masyarakat dan stakeholder.

b. Ketenagaan

Tenaga kepelatihan dan penyuluhan sangat penting dalam terlaksananya kegiatan pelatihan dan penyuluhan yang baik. Untuk itu, peningkatan kapasitas dan kompetensi tenaga kepelatihan dan penyuluhan sangat penting untuk dilaksanakan. Peningkatan kualitas ketenagaan BPPP Tegal dapat dilaksanakan dengan kegiatan pendidikan dan pelatihan, magang, dan kegiatan lainnya.

c. Monitoring dan Evaluasi Pelatihan dan Penyuluhan KP

Monitoring dan evaluasi pelatihan dan penyuluhan sangat penting dalam penyelenggaraan kegiatan pelatihan dan penyuluhan. Melalui monitoring dan evaluasi, kualitas penyelenggaraan kegiatan dapat dipantau dan diperbaiki jika terdapat kekurangan atau kesalahan dalam pelaksanaannya.

d. Kerjasama Pelatihan dan Penyuluhan KP

Selain memenuhi kebutuhan stakeholder, kerjasama juga dapat dijadikan sebagai cara untuk menambah daya jangkauan kegiatan pelatihan dan penyuluhan yang terbatas oleh wilayah kerja dan anggaran.

e. Sarana dan Prasarana

Sarana dan prasarana sangat penting dalam penyelenggaraan suatu kegiatan. Sarana dan prasarana yang dimiliki BPPP Tegal masih belum sesuai standar penyelenggaraan pelatihan. Untuk itu, peningkatan sarana dan prasarana mutlak diperlukan guna menghasilkan purnawidya yang berkualitas.

6. Dukungan Pelatihan dan Penyuluhan Terhadap Program Terobosan KKP

Dalam rangka menciptakan lapangan kerja, mendorong kesejahteraan masyarakat, dan memberi pemasukan lebih optimal bagi keuangan negara dari sektor kelautan dan perikanan, maka Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) pada tahun 2021-2024 memiliki 3 (tiga) program terobosan, yaitu :

1. Meningkatkan PNBP dari sumberdaya alam perikanan tangkap dan Kesejahteraan nelayan;
2. Menggerakkan perikanan budidaya untuk meningkatkan ekonomi masyarakat yang didukung riset kelautan dan perikanan untuk keberlangsungan sumberdaya laut dan perikanan darat;
3. Membangun kampung-kampung perikanan budidaya tawar, payau dan laut berbasis kearifan lokal.

A. Inisiatif Strategis Puslatluh KP Terhadap Program Terobosan KKP

Ketiga program terobosan tersebut telah selaras dengan RPJMN 2020-2024, misi dan arahan Presiden, dan arah 5 (lima) kebijakan KKP yang akan dilaksanakan pada tahun 2021-2024. Dalam rangka mendukung implementasi program ketiga terobosan KKP tersebut, maka BRSDM melalui Pusat Pelatihan dan Penyuluhan Kelautan dan Perikanan memperkuat penyelarasan program melalui inisiatif strategis sebagai berikut:

1. Meningkatkan PNBP dari sumberdaya alam perikanan tangkap dan kesejahteraan nelayan. Inisiatif strategis yang akan dilakukan sebagai berikut:
 - a. Bidang Pelatihan
 - 1) Menyelenggarakan program pelatihan berbasis Standar Kompetensi Nasional (SKKNI/SK3) & Standar Internasional melalui penerapan Konvensi STCW-F 1995 (ANKAPIN & ATKAPIN I, II, III, Rating & SKN);
 - 2) Melakukan akreditasi/pengesahan (approval) program dan lembaga pelatihan KP;
 - 3) Memfasilitasi penyelenggaraan proses ujian keahlian pelaut kapal penangkap ikan

- 4) Menyelenggarakan program pelatihan dalam rangka mendukung PNBP perikanan, yaitu pelatihan syahbandar, Pelatihan enumerator, Pelatihan pengawas perikanan, dan Pelatihan operator PIPP

b. Bidang Penyuluhan

- 1) Meningkatkan kemandirian melalui penguatan kelembagaan pelaku utama dan pelaku usaha kelautan dan perikanan (penumbuhan kelompok, peningkatan kelas kelompok)
 - 2) Meningkatkan skala usaha pelaku utama dan pelaku usaha kelautan dan perikanan (UMKM dan Koperasi)
 - 3) Meningkatkan koordinasi pembinaan KUB antara Pusat, Provinsi dan Kabupaten/Kota
 - 4) Meningkatkan kapasitas kelembagaan KUB menjadi lembaga yang berbadan hukum dalam bentuk koperasi
 - 5) Membantu fasilitasi pembentukan korporasi nelayan
 - 6) Menyelenggarakan program pelatihan dalam rangka mendukung PNBP perikanan, yaitu Pelatihan di bidang kepelautan perikanan untuk mendapatkan sertifikat keahlian dan keterampilan pelaut kapal penangkap ikan, pelatihan syahbandar, Pelatihan enumerator, Pelatihan pengawas perikanan, dan Pelatihan-pelatihan teknis lainnya
2. Menggerakkan perikanan budidaya untuk meningkatkan ekonomi masyarakat yang didukung riset kelautan dan perikanan untuk keberlangsungan sumberdaya laut dan perikanan darat.

a. Bidang Pelatihan

- 1) Mengembangkan sistem sertifikasi kompetensi SDM KP berbasis SKKNI dan KKNi serta SK3 di bidang budidaya perikanan
- 2) Mengembangkan jejaring kerja pelatihan dan pemberdayaan lulusan pelatihan kelautan dan perikanan
- 3) Memanfaatkan teknologi informasi dan media digital dalam rangka memperluas jangkauan layanan pelatihan (online training) di sentra budidaya perikanan

- 4) Penguatan sarana prasarana pelatihan
- 5) Penumbuhan wirausaha baru dibidang budidaya perikanan melalui pemagangan (inkubator bisnis).
- 6) Menyelenggarakan program pelatihan dalam rangka mendukung PNBP perikanan, yaitu Pelatihan di bidang kepelautan perikanan untuk mendapatkan sertifikat keahlian dan keterampilan pelaut kapal penangkap ikan, pelatihan syahbandar, Pelatihan enumerator, Pelatihan pengawas perikanan, dan Pelatihan-pelatihan teknis lainnya.

b. Bidang Penyuluhan

- 1) Pendampingan oleh Penyuluh Perikanan kepada kelompok pelaku utama/usaha pada kawasan budidaya KP
- 2) Penguatan sarana prasarana penyuluh KP
- 3) Pembentukan korporasi pembudidaya lobster, kepiting dan rajungan
- 4) Peningkatan kemandirian melalui penguatan kelembagaan pelaku utama dan pelaku usaha kelautan dan perikanan (penumbuhan kelompok, peningkatan kelas kelompok)
- 5) Peningkatan skala usaha pelaku utama dan pelaku usaha kelautan dan perikanan (UMKM dan Koperasi) Peningkatan akses informasi dan teknologi, akses pasar, dan akses permodalan

3. Membangun kampung-kampung perikanan budidaya tawar, payau dan laut berbasis kearifan lokal. Inisiatif strategis yang akan dilakukan sebagai berikut:

a. Bidang Pelatihan :

- 1) Mengembangkan metode pelatihan dengan pendekatan inkubator bisnis berbasis digital talent untuk menghasilkan startup di bidang kelautan dan perikanan (pemagangan) di lokasi pengembangan kampung perikanan;
- 2) Memanfaatkan teknologi informasi dalam rangka memperluas jangkauan layanan pelatihan (online training).

b. Bidang Penyuluhan

- 1) Peningkatan kolaborasi Penyuluhan dengan Pendidikan, Pelatihan dan Riset dalam sinergi pendidikan, pemanfaatan hasil kajiwidya, dan diseminasi hasil riset terekomendasi kepada masyarakat pelaku utama dan pelaku usaha sektor kelautan dan perikanan melalui metode penyelenggaraan penyuluhan perikanan.
- 2) Memberikan pendampingan kepada kelompok pembudidaya dalam hal kelembagaan.

B. Inisiatif Strategis BPPP Tegal Terhadap Program Terobosan KKP

Dalam rangka mendukung implementasi program ketiga terobosan KKP tersebut, maka Balai Pelatihan dan Penyuluhan Perikanan Tegal sebagai bagian dari Pusat Pelatihan dan Penyuluhan Kelautan dan Perikanan mendukung melalui inisiatif strategis sebagai berikut:

1. Meningkatkan PNBP dari sumberdaya alam perikanan tangkap dan kesejahteraan nelayan. Inisiatif strategis yang akan dilakukan sebagai berikut:

a. Kegiatan Pelatihan

- 1) Menyelenggarakan program pelatihan berbasis Standar Kompetensi Nasional (SKKNI/SK3) & Standar Internasional melalui penerapan Konvensi STCW-F 1995 (ANKAPIN & ATKAPIN III);
- 2) Memfasilitasi penyelenggaraan proses ujian keahlian pelaut kapal penangkap ikan
- 3) Menyelenggarakan program pelatihan dalam rangka mendukung PNBP perikanan.

b. Kegiatan Penyuluhan

- 1) Meningkatkan kemandirian melalui penguatan kelembagaan pelaku utama dan pelaku usaha kelautan dan perikanan (penumbuhan kelompok, peningkatan kelas kelompok)
- 2) Meningkatkan skala usaha pelaku utama dan pelaku usaha kelautan dan perikanan (UMKM dan Koperasi)
- 3) Meningkatkan koordinasi pembinaan KUB antara Pusat, Provinsi dan Kabupaten/Kota

- 4) Meningkatkan kapasitas kelembagaan KUB menjadi lembaga yang berbadan hukum dalam bentuk koperasi
- 5) Menyelenggarakan program pelatihan dalam rangka mendukung PNBP perikanan, yaitu Pelatihan di bidang kepelautan perikanan untuk mendapatkan sertifikat keahlian dan keterampilan pelaut kapal penangkap ikan, dan Pelatihan-pelatihan teknis lainnya

2. Menggerakkan perikanan budidaya untuk meningkatkan ekonomi masyarakat yang didukung riset kelautan dan perikanan untuk keberlangsungan sumberdaya laut dan perikanan darat.

a. Kegiatan Pelatihan

- 1) Mengembangkan sistem sertifikasi kompetensi SDM KP berbasis SKKNI dan KKNi serta SK3 di bidang budidaya perikanan
- 2) Mengembangkan jejaring kerja pelatihan dan pemberdayaan lulusan pelatihan kelautan dan perikanan
- 3) Memanfaatkan teknologi informasi dan media digital dalam rangka memperluas jangkauan layanan pelatihan (online training) di sentra budidaya perikanan
- 4) Penguatan sarana prasarana pelatihan
- 5) Menyelenggarakan program pelatihan dalam rangka mendukung PNBP perikanan, yaitu pelatihan-pelatihan teknis budidaya perikanan.

b. Kegiatan Penyuluhan

- 1) Pendampingan oleh Penyuluh Perikanan kepada kelompok pelaku utama/usaha pada kawasan budidaya KP
- 2) Penguatan sarana prasarana penyuluh KP
- 3) Pembentukan korporasi pembudidaya.
- 4) Peningkatan kemandirian melalui penguatan kelembagaan pelaku utama dan pelaku usaha kelautan dan perikanan (penumbuhan kelompok, peningkatan kelas kelompok)
- 5) Peningkatan skala usaha pelaku utama dan pelaku usaha kelautan dan perikanan (UMKM dan Koperasi) Peningkatan akses informasi dan teknologi, akses pasar, dan akses permodalan.

3. Membangun kampung-kampung perikanan budidaya tawar, payau dan laut berbasis kearifan lokal. Inisiatif strategis yang akan dilakukan sebagai berikut:

a. Kegiatan Pelatihan :

- 1) Memanfaatkan teknologi informasi dalam rangka memperluas jangkauan layanan pelatihan (online training).

b. Bidang Penyuluhan

- 1) Peningkatan kolaborasi Penyuluhan dengan Pendidikan, Pelatihan dan Riset dalam sinergi pendidikan, pemanfaatan hasil kajiwidya, dan diseminasi hasil riset terekomendasi kepada masyarakat pelaku utama dan pelaku usaha sektor kelautan dan perikanan melalui metode penyelenggaraan penyuluhan perikanan.
- 2) Memberikan pendampingan kepada kelompok pembudidaya dalam hal kelembagaan.

7. *Strategi pelatihan dan penyuluhan BPPP Tegal*

Dengan memperhatikan tujuan dan sasaran kegiatan yang akan dicapai BPPP Tegal pada tahun 2020-2024, maka strategi yang dikembangkan adalah sebagai berikut.

Sasaran Kegiatan 1: Pendampingan kelompok pelaku usaha/utama dalam mendukung terwujudnya kesejahteraan masyarakat KP

Strategi 1: Membangun sistem penyuluhan KP yang bersinergi dengan riset dan pengembangan SDM serta program eselon I lingkup Kementerian Kelautan dan Perikanan dan Pemerintah Daerah

Langkah Operasional:

1. Penguatan kelembagaan pelaku usaha/masyarakat kelautan dan perikanan (penumbuhan dan peningkatan kelas kelompok)
2. Mendiseminasikan inovasi hasil riset teknologi kelautan dan perikanan kepada pelaku utama dan pelaku usaha perikanan
3. Mengembangkan sistem informasi penyuluhan kelautan dan perikanan berbasis online
4. Meningkatkan kapasitas Penyuluh Perikanan berbasis kebutuhan inovasi teknologi adaptif kepada pelaku utama dan pelaku usaha kelautan dan perikanan.

5. Mengidentifikasi dan memetakan teknologi kelautan dan perikanan yang dibutuhkan pelaku utama kelautan dan perikanan
6. Perlindungan dan pemberdayaan pelaku usaha
7. Peningkatan kapasitas pelaku utama dan pelaku usaha sebagai pilar pembangunan ekonomi berbasis komoditas unggulan KP.

Sasaran Kegiatan 2: Kapasitas dan kompetensi SDM KP meningkat

Strategi 1: Menyelenggarakan kegiatan pelatihan dan penyuluhan dengan memanfaatkan hasil riset dan inovasi untuk menjawab isu dan masalah sektor kelautan dan perikanan

Langkah Operasional:

1. Memanfaatkan teknologi terapan dalam mendukung percepatan industrialisasi KP.
2. Menyelenggarakan pelatihan dan penyuluhan dan diseminasi teknologi yang direkomendasikan dan inovasi teknologi adaptif lokasi.
3. Menyelenggarakan pelatihan dan penyuluhan dengan memanfaatkan hasil kajian kebijakan (policy brief) dalam merespon isu-isu terkini yang bersifat responsif dan antisipatif terhadap isu-isu yang sedang dan potensial berkembang.
4. Membuat percontohan penyuluhan di lokasi binaan penyuluhan yang menerapkan teknologi inovasi hasil riset.
5. Berkolaborasi dengan pemerintah daerah dalam mendiseminasi hasil riset yang disesuaikan dengan teknologi adaptif lokasi.

Strategi 2: Membangun sistem penyelenggaraan pelatihan berbasis kerjasama industri

Langkah operasional:

1. Mengembangkan jejaring kerja pelatihan dan pemberdayaan lulusan pelatihan kelautan dan perikanan
2. Mengembangkan metode pelatihan dengan pendekatan inkubator bisnis berbasis digital talent untuk menghasilkan startup di bidang kelautan dan perikanan (pemagangan) di lokasi pengembangan kampung perikanan;
3. Mengembangkan sertifikasi kompetensi KP sesuai kebutuhan DUDI berkerjasama dengan Lembaga Sertifikasi Profesi.

Sasaran Kegiatan 4: Tersedianya Sarana dan Prasarana Pelatihan dan Penyuluhan KP Yang Terstandar

Strategi: Pemenuhan Sarana dan Prasarana Pelatihan dan Penyuluhan sesuai dengan standar yang telah ditentukan;

Dengan langkah Operasional:

1. Mengidentifikasi dan memetakan sarana dan prasarana pelatihan dan penyuluhan kelautan dan perikanan yang ada saat ini;
2. Menyiapkan perangkat/sarana untuk pelatihan, dan penyuluhan berbasis digital (e-learning, dan e-training);
3. Meningkatkan kapasitas sarana prasarana pelatihan sesuai standar;
4. Melakukan penguatan sarana prasarana penyuluhan;

Sasaran Kegiatan 5: Terselenggaranya Penyuluhan Kelautan dan Perikanan

Langkah Operasional:

1. Menjalin kerja sama dengan lembaga riset dalam pelaksanaan diseminasi dan penyuluhan yang saling menguatkan;
2. Membuat publikasi hasil riset dengan menggunakan bahasa penyuluhan yang lebih mudah dipahami dan menyesuaikan dengan kebutuhan pelaku utama/pelaku usaha.
3. Memanfaatkan teknologi informasi dalam rangka memperluas jangkauan layanan penyuluhan di sentra budidaya KP;
4. Mengembangkan metode penyuluhan sesuai kebutuhan pelaku utama;
5. Penguatan kelembagaan penyuluhan KP, meliputi sinergitas dan koordinasi dengan kelembagaan penyuluhan tingkat regional dan pemerintah daerah, serta penguatan kelompok pelaku utama KP.
6. Pengembangan Metode dan Materi Penyuluhan melalui Pengembangan materi penyuluhan bentuk cetak, CD video, web; Penyuluhan dengan media cetak, tertayang dan terdengar, Pemanfaatan sms gateway, web (cyber extension); dan Temu: aplikasi, percontohan, dll.

Sasaran Kegiatan 6: Terselenggaranya Pelatihan SDM Kelautan dan Perikanan

Langkah Operasional:

1. Menyelenggarakan program pelatihan berbasis Standar Kompetensi Nasional (SKKNI/SK3) dan Standar Internasional melalui penerapan Konvensi STCW-F 1995 (ANKAPIN & ATKAPIN II, III, Rating & SKN);
2. Menyelenggarakan program pelatihan dalam rangka mendukung PNBPerikanan, yaitu Pelatihan di bidang kepelautan perikanan untuk mendapatkan sertifikat keahlian dan keterampilan pelaut kapal penangkap ikan, pelatihan syahbandar, Pelatihan enumerator, Pelatihan pengawas perikanan, dan Pelatihan-pelatihan teknis lainnya.
3. Fasilitasi penyelenggaraan proses ujian keahlian pelaut kapal penangkap ikan;
4. Pelaksanaan Pelatihan masyarakat dengan metode Blended dan Full Online Training;
5. Penyiapan Materi Pelatihan berbasis Kaji Widya;
6. Pelaksanaan sertifikasi Kompetensi masyarakat kelautan dan perikanan bekerjasama dengan LSP;
7. Penyiapan Sertifikasi Kelembagaan Pelatihan dan Penyuluhan agar sesuai dengan standar lembaga pelatihan;

Sasaran Kegiatan 7: Terselenggaranya Layanan Pelatihan dan Penyuluhan Kelautan dan Perikanan

1. Menyusun NSPK pelatihan, dan NSPK Pelatihan berbasis digital.
2. Mengembangkan modul, kurikulum pendidikan dan pelatihan berbasis SKKNI dan kebutuhan organisasi
3. Mengembangkan sertifikasi kompetensi KP bekerjasama dengan Lembaga Sertifikasi Profesi.
4. Melakukan akreditasi/pengesahan (approval) program dan lembaga pelatihan KP;
5. Meningkatkan kompetensi tenaga pelatih sesuai bidang keahlian/keilmuan yang dibutuhkan.
6. Mengembangkan sistem pelatihan vokasi sesuai kebutuhan pelaku utama, dengan metode pembelajaran jarak jauh e-learning, online training. dan skema blended training (gabungan online training dan klasikal).
7. Menyusun modul, kurikulum, dan materi pelatihan KP digital.
8. Menyiapkan SDM dengan keterampilan teknologi informasi
9. Menyusun Menyiapkan NSPK Penyuluhan Kelautan dan Perikanan dan NSPK penyuluhan berbasis digital;

10. Penataan Kebijakan Penyuluhan KP, melalui Penyelesaian legislasi: Kebijakan dan Strategi Penyuluhan KP, Mekanisme Penyuluhan KP, Kelembagaan, Sarpras, Metoda dan Materi, dan Pola Diklat Penyuluh.

Sasaran Kegiatan 8: Tatakelola pemerintahan yang baik lingkup Pelatihan dan Penyuluhan KP

Langkah Operasional:

1. Memperkuat tata kelola dan kerjasama pelatihan dan penyuluhan yang dilandasi prinsip-prinsip konsultatif, komprehensif, fleksibel, transparan;
2. Meningkatkan pranata dan kelembagaan birokrasi yang efektif, efisien dan berorientasi pada layanan prima melalui pembinaan dan pendampingan Reformasi Birokrasi, pelaksanaan SAKIP, dan menuju satker berstatus WBK/WBBM;
3. Pengelolaan perencanaan dan anggaran pembangunan secara akuntabel;
4. Pengelolaan keuangan sesuai prinsip pengelolaan keuangan negara secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan.

Penjelasan terkait dengan strategi Puslatluh dalam mencapai target peningkatan kesejahteraan masyarakat dijabarkan sebagaimana gambar 8. Dengan Sumberdaya yang ada, baik itu SDM yang terdiri dari pegawai pusat, widyaiswara, instruktur, pengelola pelatihan, penyuluh perikanan PNS dan Penyuluh Perikanan Bantu, serta kelembagaan pusat dan UPT yang melaksanakan fungsi pelatihan dan penyuluhan serta didukung dengan anggaran yang ada, merupakan modal awal untuk mewujudkan tujuan tersebut. Pada prosesnya yang menjadi prioritas adalah pelatihan aparatur dan non aparatur, peningkatan keterampilan masyarakat KP, penumbuhan dan peningkatan kelas kelompok serta pembentukan lembaga kemandirian kelautan dan perikanan. Pada prosesnya akan dilakukan terus evaluasi dan monitoring untuk mendapatkan feedback dari stakeholder agar dapat dilakukan perbaikan-perbaikan kedepannya.



Gambar 8. Roadmap Pelatihan dan Penyuluhan KP

Tahun 2020 fokus pada pembentukan dan pengembangan peningkatan kompetensi, dengan langkah (a) penyempurnaan dan penguatan organisasi, *business process*, Teknologi informasi, *Human Research System* dan Kerangka Hukum; (b) Membangun *public awareness* dan *Benchmarking* menuju *Center of Excellent*; (c) Memiliki tenaga pelatih dan penyuluh perikanan yang kompeten dan terkoneksi dengan sistem digital; (d) Revitalisasi dan Standardisasi Lembaga, Sarana dan Prasarana berstandar Internasional.

Tahun 2021 targetnya adalah Perluasan Jangkauan Layanan Pelatihan dan Penyuluhan KP dan Penguatan Lembaga Pelatihan dan Penyuluhan KP, dengan langkah (a) menjadikan BPPP Tegal berstatus BLU sehingga dapat mengelola aset dan memanfaatkan dana masyarakat sehingga mengurangi beban APBN sebesar 20-30%; (b) Membangun *public awareness* dan *Benchmarking* menuju *Center of Excellent*; (c) Memiliki tenaga pelatih dan penyuluh perikanan yang kompeten dan terkoneksi dengan sistem digital; (d) Revitalisasi dan Standardisasi Lembaga, Sarana dan Prasarana berstandar Internasional.

Tahun 2022 menjadi Lembaga Pelatihan dengan layanan Standar Internasional (center of excellent) sesuai dengan persyaratan konvensi Internasional (IMO, ILO, WTO, dll), dan Penyuluhan sebagai Prime mover pembangunan KP, dengan langkah:

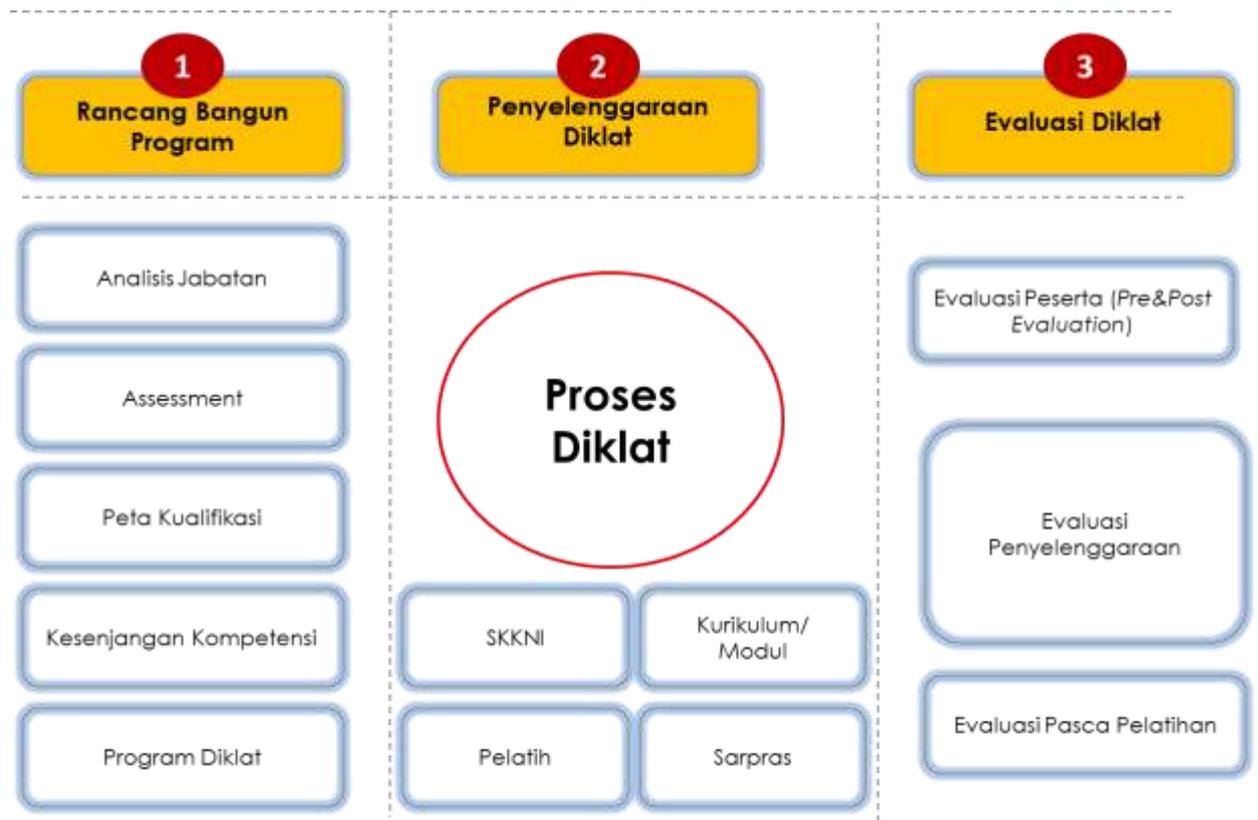
(a) menjadikan BPPP Tegal sebagai lembaga pelatihan berstatus BLU, dengan mulai melakukan penguatan internal untuk melakukan operasional secara mandiri (Non ABN); (b) Membangun public awareness dan Benchmarking menuju Center of Excellent ; (c) Membangun jaringan dan lembaga pelatihan terkemuka dan ternama dunia; (d) Revitalisasi dan Standardisasi Lembaga, Sarana dan Prasarana berstandar Internasional.

Tahun 2023 menjadi Lembaga Pelatihan bertaraf Internasional (center of excellent), dan Penyuluhan sebagai Prime mover sekaligus kunci keberhasilan pembangunan KP, dengan langkah: (a) menjadikan BPPP tegal sebagai lembaga pelatihan berstatus BLU, dengan mulai melakukan penguatan internal untuk melakukan operasional secara mandiri (NonAPBN); (b) Membangun jaringan dan lembaga pelatihan terkemuka dan ternama dunia; (c) Revitalisasi dan Standardisasi Lembaga, Sarana dan Prasarana berstandar Internasional.

Tahun 2024 diharapkan Pelatihan dan Penyuluhan Mandiri dan Profesional dengan didukung Penyuluh dan Pelatihan bertaraf internasional, dengan menjadi salah satu training center KKP dengan standar kompetensi dunia internasional dan berkontribusi dalam mencetak 1 juta sertifikasi kompetensi berstandar nasional dan Internasional dan menjadi lembaga pelatihan berstatus BLU.

Adapun secara teknis pendetailan proses penyelenggaraan diklat dilaksanakan secara menyeluruh dengan melibatkan unsur-unsur pendukung dan dilaksanakan sesuai prosedur dan tahapannya. Secara garis besar penyelenggaraan diklat dilaksanakan dalam tiga tahapan, sebagaimana Gambar 9.

Tahap Pertama adalah Rancang Bangun Program, tahapan ini sebagai bagaian dari tahapan identifikasi kebutuhan diklat. Termasuk didalam nya adalah: Analisis jabatan, assessment untuk mengetahui tingkat kompetensi, peta kualifikasi, selanjutnya dilakukan analisis kesenjangan kompetensi antara kompetensi yang sudah dimiliki dengan minimal kompetensi yang harus dimiliki untuk menduduki jabatan struktural atau fungsional tertentu. Selanjutnya hasil analisis kesenjangan kompetensi tersebut menjadi dasar penyusunan program diklat yang akan diselenggarakan.



Gambar 9. Dukungan Penyelenggaraan Diklat

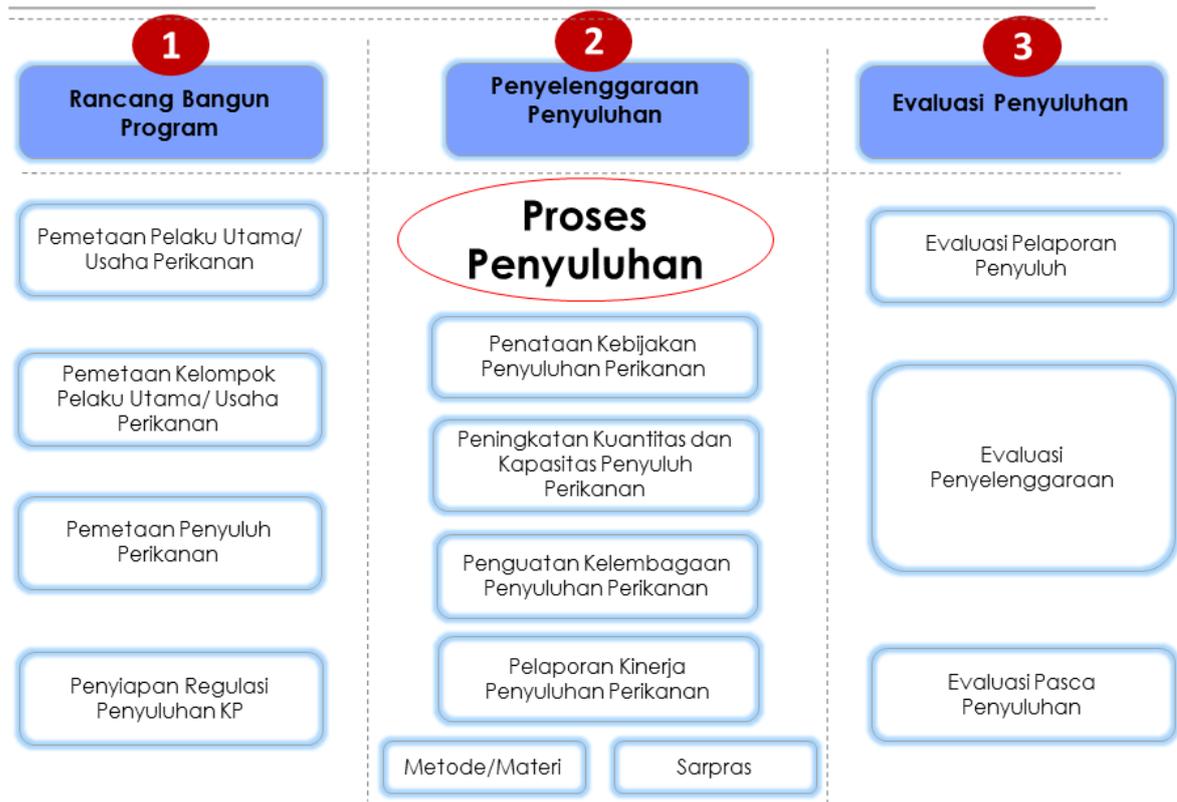
Tahap kedua adalah Penyelenggaraan Diklat, tahapan ini dimana tidak saja hanya tentang pelaksanaan diklat, akan tetapi juga menyangkut perangkat pendukungnya seperti SKKNI, Kurikulum dan Modul, pelatih yang terdiri atas widiyaiswara dan instruktur, serta sarana prasarana pelatihan.

Tahap ketiga adalah evaluasi diklat, evaluasi menyangkut kemampuan peserta latih, *pretest* dan *post evaluation*, evaluasi penyelenggaraan diklat serta evaluasi pasca pelatihan.

Sedangkan untuk pendetailan proses penyelenggaraan penyuluhan merupakan satu kesatuan yang utuh yang dilaksanakan dengan tahapan-tahapan sebagaimana Gambar 10.

Tahap Pertama, Tahap rancang bangun program yang terdiri atas pemetaan pelaku utama/usaha dan kelompoknya baik dalam hal jumlah, lokasi, identifikasi karakter sosial, budaya perorangan maupun kelompok, identifikasi jenis usaha, komoditas dan karakteristik produk yang dihasilkan, selain itu juga pemetaan penyuluh perikanan yang terdiri atas jumlah penyuluh, kompetensinya, sebarannya serta jenjang jabatannya. Selain pemetaan penyuluh dan sasaran penyuluhan, kita

juga perlu membuat peyiapan regulasi penyuluhan KP sebagai acuan dan dasar hukum pelaksanaan penyuluhan. Kewenangan penyelenggaraan penyuluhan perikanan yang sudah ditarik ke pusat, tentunya harus diatur lebih lanjut operasional pelaksanaannya dan mekanisme tata hubungan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah.



Gambar 10. Proses Penyelenggaraan Penyuluhan

Tahap Kedua adalah tahap penyelenggaraan penyuluhan. Pada tahapan ini sudah mulai dilakukan penataan kebijakan terkait penyuluhan perikanan, peningkatan kuantitas dan kapasitas penyuluh perikanan, penguatan kelembagaan penyuluhan perikanan baik kelembagaan pelaku utama maupun kelembagaan penyuluh perikanan, perancangan konsep dan format pelaporan penyuluh perikanan, metode dan materi penyuluhan yang perlu dilakukan pengembangan serta peningkatan sarana dan prasarana penyuluhan KP mendukung keberhasilan penyelenggaraan penyuluhan.

Tahap Ketiga yang cukup penting adalah tahap evaluasi, baik itu evaluasi terkait pelaporan kinerja penyuluh perikanan, evaluasi penyelenggaraan penyuluhan perikanan serta evaluasi pasca penyuluhan. Evaluasi sangat dibutuhkan untuk

mengetahui dampak dari kegiatan penyuluhan kepada sasaran utama penyuluhan, sehingga dapat diketahui pengembangan yang dapat dilakukan agar pelaksanaan penyuluhan lebih efektif dan efisien.

8. Kegiatan Prioritas Pelatihan dan Penyuluhan KP

Untuk mendukung pencapaian tujuan pembangunan KP, kegiatan prioritas Pelatihan dan Penyuluhan KP pada Tahun 2020- 2024, adalah :

a. Pelatihan KP

Kegiatan prioritas pelatihan pada periode 2020-2024 diarahkan untuk meningkatkan kualitas pelatihan KP yang difokuskan pada :

- 1) Pelatihan Masyarakat KP
- 2) Pelatihan Teknis Bidang Kelautan dan Perikanan
- 3) Pelatihan Keahlian Bidang Kepelautan
- 4) Sertifikasi kompetensi Masyarakat KP
- 5) Sarana Prasarana Pelatihan KP

b. Penyuluhan KP

Kegiatan prioritas penyuluhan KP pada periode 2020-2024 diarahkan untuk meningkatkan kualitas penyuluhan KP yang difokuskan pada:

- 1) Kelompok Pelaku Utama/Usaha yang Mendapatkan Pendampingan dari Penyuluh KP
- 2) Penguatan kelembagaan kelompok KP
- 3) Percontohan Penyuluhan Kelautan dan Perikanan yang diterapkan

9. Kerangka Regulasi

Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, selain mengenal kerangka anggaran, juga terdapat kerangka regulasi yang mempengaruhi kinerja pembangunan nasional. Kementerian Kelautan dan Perikanan, dalam rencana kegiatan Pusat Pelatihan dan Penyuluhan KP Tahun 2020-2024, memerlukan kerangka regulasi yang merupakan perencanaan pembentukan regulasi untuk memfasilitasi, mendorong dan mengatur perilaku masyarakat dan penyelenggara

negara dalam rangka mencapai tujuan bernegara.

Kerangka regulasi dalam Rencana Strategis Pusat Pelatihan dan Penyuluhan KP Tahun 2020-2024, disiapkan mengacu pada program legislasi nasional dan KKP, yang meliputi:

- 1) Rancangan Peraturan Menteri tentang Petunjuk Teknis Tata Cara Penilaian Angka Kredit Penyuluh Perikanan;
- 2) Rancangan Peraturan Menteri tentang Tata Cara Pengangkatan PNS Dalam Jabatan Fungsional Penyuluh Perikanan Melalui Penyesuaian/Inpassing;
- 3) Rancangan Peraturan Menteri tentang Mekanisme Kerja Kelembagaan Penyuluhan Perikanan;
- 4) Rancangan Peraturan Menteri tentang Penilaian dan Penetapan Kelompok Perikanan Teladan/Berprestasi Nasional Pusluh KP;
- 5) Rancangan Peraturan Menteri tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyuluhan Kelautan dan Perikanan;
- 6) Rancangan Peraturan Menteri tentang Pedoman Umum Penumbuhan dan Pengembangan Kelembagaan Pelaku Utama Perikanan;
- 7) Rancangan Peraturan Menteri tentang Penerapan Jenjang Kualifikasi Nasional Indonesia Bidang Perikanan;
- 8) Perubahan Permen KP tentang Organisasi dan Tata Kerja BPPP Tegal, BPPP Banyuwangi, BPPP Medan, BPPP Ambon, BPPP Bitung;
- 9) Perubahan Permen KP tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Riset Perikanan Budidaya Air Tawar dan Penyuluhan Perikanan, Balai Besar Riset Budidaya Laut dan Penyuluhan Perikanan, Balai Riset Perikanan Perairan Umum dan Penyuluhan Perikanan, Balai Riset Perikanan Budidaya Air Payau dan Penyuluhan Perikanan;
- 10) Rancangan Permen tentang Pedoman Penyuluhan Perikanan;

Selain itu, Rancangan Peraturan dan Keputusan Kepala BRSDM Terkait Pelatihan dan Penyuluhan KP tentang:

- 1) Penugasan Penyuluh Perikanan PNS;
- 2) Penetapan Kinerja Penyuluh Perikanan;

- 3) Wilayah Kerja Balai Pelatihan dan Penyuluhan serta Balai Riset dan Penyuluhan;
- 4) Rancangan Induk Pengembangan (RIP) SKKNI dan KKNI Sektor Kelautan dan Perikanan;
- 5) Pedoman Pelatihan Aparatur KP;
- 6) Pedoman Pelatihan Masyarakat.

10. Kerangka Kelembagaan

Kerangka kelembagaan merupakan perangkat Kementerian/ Lembaga (struktur organisasi, ketatalaksanaan, dan pengelolaan aparatur sipil negara) yang digunakan untuk mencapai visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan sesuai dengan tugas dan fungsi Kementerian/Lembaga yang disusun dengan berpedoman pada RPJM Nasional. Kegiatan Pelatihan dan penyuluhan ditujukan kepada masyarakat perikanan pelaku utama dan pelaku usaha di sektor penangkapan, budidaya, pengolahan, pemasar hasil perikanan, serta masyarakat kelautan dan perikanan lainnya. Kegiatan pelatihan juga dilengkapi sertifikat kompetensi yang dikeluarkan oleh lembaga sertifikasi nasional. Kegiatan penyuluhan lebih diarahkan kepada pendampingan kepada kelompok pelaku utama/usaha, pengembangan penyuluhan di bidang kelautan dan perikanan.

Kegiatan Pelatihan dan Penyuluhan Kelautan dan Perikanan dilaksanakan oleh Balai Pelatihan dan Penyuluhan Perikanan (BPPP) Tegal, Pusat Pelatihan Mandiri Kelautan dan Perikanan (P2MKP), dan kerja sama dengan lembaga lainnya yang mempunyai tugas pokok pelatihan dan penyuluhan.

Guna memperkuat jaringan dan memperluas jangkauan pelayanan pelatihan dan penyuluhan kepada masyarakat dan pelaku utama, pada periode ini Balai Pelatihan dan Penyuluhan Perikanan (BPPP) Tegal menyiapkan strategi penyiapan kelembagaan dengan mengembangkan status kelembagaan yaitu perubahan satker menjadi satker Badan Layanan Umum (BLU). Pengembangan ini bertujuan meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat serta meningkatkan pendapatan negara dari Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) sector kelautan dan perikanan.

Proses pengembangan kelembagaan ini telah dimulai pada tahun 2018 dan masih dalam proses pada tingkat kementerian. Diharapkan pada tahun 2021 ini dapat

terlaksana verifikasi oleh Kementerian Keuangan sehingga Balai Pelatihan dan Penyuluhan Perikanan Tegal akan ditetapkan menjadi Badan Layanan Umum (BLU).

BAB IV

TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN

1. Target Kinerja

Indikator Kinerja Sasaran Strategis

Sasaran Strategis yang telah ditetapkan KKP merupakan kondisi yang akan dicapai secara nyata yang mencerminkan pengaruh yang ditimbulkan oleh adanya hasil (*outcome/impact*) dari satu atau beberapa program. Sasaran strategis pembangunan kelautan dan perikanan merupakan kondisi yang diinginkan dapat dicapai oleh KKP sebagai suatu *outcome/impact* dari beberapa program yang dilaksanakan, menggunakan pendekatan metoda *Balanced Scorecard* (BSC) yang dibagi dalam empat perspektif, yakni *stakeholders prespective*, *customer perspective*, *internal process perspective*, dan *learning and growth perspective*.

Indikator Kinerja Kegiatan merupakan ukuran alat ukur yang mengindikasikan keberhasilan pencapaian keluaran (*output*) dari suatu kegiatan. Indikator Kinerja Kegiatan telah ditetapkan secara spesifik untuk mengukur pencapaian kinerja berkaitan dengan sasaran kegiatan (*output*). Indikator Kinerja Kegiatan dalam Struktur Manajemen Kinerja di KKP merupakan sasaran kinerja kegiatan yang secara akuntabilitas berkaitan dengan unit organisasi K/L setingkat. Sasaran Strategis Program Pengembangan SDM KP merupakan kondisi yang akan dicapai secara nyata yang mencerminkan pengaruh yang ditimbulkan oleh adanya hasil (*outcome/impact*) dari satu atau beberapa program. Rincian Indikator Kinerja BPPP Tegal Tahun 2020-2024 adalah sebagai berikut ini:

Tabel 2. Matrik Kinerja Program Dukungan Manajemen Badan Riset Dan Sumber Daya Manusia Kelautan Dan Perikanan Tahun 2020 – 2024

PROGRAM/ KEGIATAN	SASARAN PROGRAM (OUTCOME) SASARAN KEGIATAN (OUTPUT) INDIKATOR	TARGET					INDIKASI PENDANAAN (Rp. Miliar)					TOTAL 2020-2024 (Rp. Miliar)
		2020 (Awal)	2021 (Awal)	2022	2023	2024	2020 (Awal)	2021 (Awal)	2022	2023	2024	
TOTAL PUSLATLUH							743,86	611,88	860,87	1.103,75	1.130,28	4.450,64
Program Dukungan Manajemen							564,46	468,62	542,27	542,74	546,52	2.664,60
	Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik di Lingkungan Puslatluh KP											
Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya							555,63	466,2	529,8	530,0	533,2	2.614,8
	Layanan Dukungan Manajemen Eselon I						6,14	4,66	11,2	10,7	10,7	
	<i>Nilai PM PRB BRSDMKP (nilai)</i>											
	<i>Indeks Profesionalitas ASN (indeks)</i>	72	73	74	75	76						
	<i>Unit Kerja yang Berpredikat Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi</i>		1	1	1	1						
	<i>Batas Toleransi Materialitas Temuan Pengawas Eksternal dari Total Realisasi Anggaran (%)</i>	≤1	≤1	≤1	≤1	≤1						
	<i>Nilai PM SAKIP (nilai)</i>											
	<i>Nilai Maturitas SPIP (level)</i>											
	<i>Persentase unit kerja yang menerapkan sistem manajemen pengetahuan yang terstandar (%)</i>	82	84	86	88	90						
	<i>Persentase Rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja (%)</i>	60	65	70	75	80						
	<i>Unit yang menerapkan inovasi pelayanan publik (unit kerja)</i>											
	<i>Nilai IKPA (nilai)</i>	88	-	-	-	-						
	<i>Nilai NKA (nilai)</i>	85	-	-	-	-						
	Layanan Sarana dan Prasarana Internal						0,47	0,47	11,3	7,7	8,1	
	<i>Tersedianya sarana dan prasarana Pusat Pelatihan dan Penyuluhan KP (layanan)</i>	1	1	4	3	3						

PROGRAM/ KEGIATAN	SASARAN PROGRAM (OUTCOME) SASARAN KEGIATAN (OUTPUT) INDIKATOR	TARGET					INDIKASI PENDANAAN (Rp. Miliar)					TOTAL 2020-2024 (Rp. Miliar)
		2020 (Awal)	2021 (Awal)	2022	2023	2024	2020 (Awal)	2021 (Awal)	2022	2023	2024	
	Layanan Perkantoran						549,0	461,1	507,3	511,6	514,4	
	<i>Jumlah pemenuhan pembayaran gaji dan tunjangan Lingkup Puslatluh KP (bulan)</i>	12	12	12	12	12	527,8	442,0	467,8	467,8	467,9	
	<i>Jumlah pemenuhan layanan perkantoran Lingkup Puslatluh KP (bulan)</i>	12	12	12	12	12	21,2	19,0	39,4	43,8	46,6	
	Pendidikan dan Pelatihan Aparatur KP						8,8	2,4	12,5	12,7	13,3	49,8
	Aparatur kelautan dan perikanan yang kompeten						8,8	2,4	12,5	12,7	13,3	
	<i>Jumlah Aparatur Kelautan dan Perikanan yang kompeten</i>	2.280	4.280	4.725	4.800	5.000						

Tabel 3. Matrik Kinerja Program Pendidikan Dan Pelatihan Vokasi Tahun 2020 – 2024

PROGRAM/ KEGIATAN	SASARAN PROGRAM (OUTCOME) SASARAN KEGIATAN (OUTPUT) INDIKATOR	TARGET					INDIKASI PENDANAAN (Rp. Miliar)					TOTAL 2020-2024 (Rp. Miliar)
		2020 (Awal)	2021 (Awal)	2022	2023	2024	2020 (Awal)	2021 (Awal)	2022	2023	2024	
	Program Pendidikan dan Pelatihan Vokasi						179,4	143,3	318,6	561,0	583,8	1.786,0
	SDM KP peserta diklat yang terserap di di Dunia Usaha dan Dunia Industri											
	<i>Persentase Lulusan pendidikan dan pelatihan yang terserap di Dunia Usaha dan Dunia Industri (%)</i>	60	60	65	70	75						
	SDM KP peserta diklat yang membentuk start up (usaha rintisan)											
	<i>Lulusan pendidikan dan pelatihan yang membentuk start up (usaha rintisan) (orang)</i>	25	105	115	125	155						
	Kelompok kelautan dan perikanan mandiri yang dibentuk											
	<i>Kelompok kelautan dan perikanan yang dibentuk (kelompok)</i>	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000						
	<i>Kelompok kelautan dan perikanan yang ditingkatkan kelasnya (kelompok)</i>	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500						

PROGRAM/ KEGIATAN	SASARAN PROGRAM (OUTCOME) SASARAN KEGIATAN (OUTPUT) INDIKATOR	TARGET					INDIKASI PENDANAAN (Rp. Miliar)					TOTAL 2020-2024 (Rp. Miliar)
		2020 (Awal)	2021 (Awal)	2022	2023	2024	2020 (Awal)	2021 (Awal)	2022	2023	2024	
	Iptek hasil kegiatan pendidikan, pelatihan dan penyuluhan KP yang dimanfaatkan oleh masyarakat											
	<i>Desa/kawasan mitra yang menerapkan iptek KP (paket)</i>	5	5	5	5	5						
Pelatihan dan Penyuluhan Kelautan dan Perikanan							179,4	143,3	318,6	561,0	583,8	1.786,0
	Norma, Standard, Prosedur dan Kriteria Pelatihan dan Penyuluhan KP						3,5	1,4	5,5	6,5	7,5	
	<i>Jumlah Norma, Standard, Prosedur dan Kriteria Pelatihan dan Penyuluhan KP (NSPK)</i>	1	4	4	4	4						
	Masyarakat Kelautan dan Perikanan yang Bersertifikat Kompetensi						2,1	0,1	4,1	5,1	6,0	
	<i>Jumlah Masyarakat Kelautan dan Perikanan yang Bersertifikat Kompetensi (Orang)</i>	3.500	180	6.500	8.500	10.000						
	Inovasi yang diterapkan sebagai percontohan Penyuluhan Kelautan dan Perikanan						2,8	0,5	3,7	4,2	4,7	
	<i>Jumlah Inovasi yang diterapkan sebagai percontohan Penyuluhan Kelautan dan Perikanan (Produk)</i>	34	9	40	45	50						
	Kelompok Pelaku Utama/Usaha yang Mendapatkan Pendampingan dari Penyuluh KP						90,5	87,4	112,1	141,2	147,7	
	<i>Jumlah Kelompok Pelaku Utama/Usaha yang Mendapatkan Pendampingan dari Penyuluh KP (Kelompok Masyarakat)</i>	41.000	41.000	43.000	49.000	55.000						
	Sarana Pelatihan dan Penyuluhan Kelautan dan Perikanan						28,5	15,4	40,0	122,0	116,1	
	<i>Jumlah Sarana Pelatihan dan Penyuluhan Kelautan dan Perikanan (Unit)</i>	7	8	12	12	12						
	Prasarana Pelatihan dan Penyuluhan Kelautan dan Perikanan						-	15,2	37,2	122,0	116,1	
	<i>Jumlah Prasarana Pelatihan dan Penyuluhan Kelautan dan Perikanan (Unit)</i>	0	7	12	12	12						
	Masyarakat Kelautan dan Perikanan yang dilatih						52,0	23,2	116,0	160,0	185,6	
	<i>Jumlah Masyarakat Kelautan dan Perikanan yang dilatih (Orang)</i>	25.200	29.000	36.000	50.000	58.000						

Indikator kinerja utama BPPP Tegal selaras dengan indikator kinerja utama pusat pelatihan dan penyuluhan kelautan dan perikanan dalam mendukung sasaran strategis kementerian kelautan dan perikanan. Berikut Indikator Kinerja BPPP Tegal 2021 – 2024:

Tabel 4. Target Kinerja BPPP Tegal 2020 - 2024

No	Sasaran Strategis Rencana Kegiatan KKP	Sasaran Program BRSDM	Sasaran Kegiatan Puslatluh KP dan BPPP Tegal	Indikator Kinerja Utama Puslatluh KP	Indikator Kinerja Utama BPPP Tegal	Target				
						2020	2021	2022	2023	2024
1	SS1. Terwujudnya Kesejahteraan Masyarakat KP	SP 1. Pendampingan kelompok pelaku usaha/utama mendukung terwujudnya kesejahteraan masyarakat KP	SK 1. Pendampingan kelompok pelaku usaha/utama dalam mendukung terwujudnya kesejahteraan masyarakat KP	Kelompok kelautan dan perikanan yang ditingkatkan kelasnya	Kelompok kelautan dan perikanan yang ditingkatkan kelasnya di Satminkal BPPP Tegal (Kelompok)	-	300	300	300	300
				kelompok kelautan dan perikanan yang dibentuk	Kelompok kelautan dan perikanan yang dibentuk di Satminkal BPPP Tegal (Kelompok)	-	300	300	300	300
2	SS 4. Kapasitas dan kompetensi SDM KP yang meningkat	SP 3. Kapasitas dan kompetensi SDM KP meningkat	SK 2. Kapasitas dan kompetensi SDM KP yang meningkat	Desa/kawasan mitra yang menerapkan Iptek	Desa/kawasan mitra yang menerapkan iptek di BPPP Tegal (paket)	1	1	1	1	1
				Persentase Lulusan pendidikan dan pelatihan yang terserap di Dunia Usaha dan Dunia Industri	Persentase lulusan pendidikan dan pelatihan yang terserap di Dunia Usaha dan Dunia Industri BPPP Tegal (%)	60	60	65	70	75
				Lulusan pendidikan dan pelatihan yang membentuk start up (usaha rintisan)	Lulusan pelatihan yang membentuk start up (usaha rintisan) BPPP Tegal (orang)	5 (org)	38	40	42	48
			SK 4. Tersedianya Sarana dan prasarana Pelatihan dan Penyuluhan KP Yang Terstandar	Jumlah Sarana pelatihan dan penyuluhan KP yang terstandar	Jumlah Sarana pelatihan dan penyuluhan KP yang terstandar di BPPP Tegal (unit)	1	1	2	2	2
				Jumlah Prasarana pelatihan dan penyuluhan KP yang terstandar	Jumlah Prasarana pelatihan dan penyuluhan KP yang terstandar di BPPP Tegal (unit)	1	1	2	2	2

No	Sasaran Strategis Rencana Kegiatan KKP	Sasaran Program BRSDM	Sasaran Kegiatan Puslatluh KP dan BPPP Tegal	Indikator Kinerja Utama Puslatluh KP	Indikator Kinerja Utama BPPP Tegal	Target				
						2020	2021	2022	2023	2024
			SK 5. Terselenggaranya Penyuluhan Kelautan dan Perikanan	Jumlah Kelompok Pelaku utama/ Pelaku Usaha yang disuluh	Jumlah Kelompok Pelaku utama/ Pelaku Usaha yang disuluh di BPPP Tegal (kelompok)	5.879	5.879	6.179	7.041	7.903
				Jumlah Percontohan Penyuluhan Kelautan dan Perikanan yang diterapkan	Jumlah Percontohan Penyuluhan Kelautan dan Perikanan yang diterapkan di BPPP Tegal (unit)	3	1	5	6	6
			SK 6. Terselenggaranya Pelatihan SDM Kelautan dan Perikanan	Jumlah masyarakat kelautan dan perikanan yang dilatih	Jumlah masyarakat kelautan dan perikanan yang dilatih BPPP Tegal (orang)	2.820	10.462	12.500	17.300	20.000
				Pelaksanaan Pelatihan Masyarakat Berbasis "Full Online Training"	Pelaksanaan Pelatihan Masyarakat Berbasis "Full Online Training" BPPP Tegal (paket)	-	20	20	20	20
				Tersedianya Materi Pelatihan berbasis Kaji Widya	Tersedianya Materi Pelatihan berbasis Kaji Widya di BPPP Tegal (Paket)	-	4	4	4	4
				Jumlah SDM KP yang bersertifikat kompetensi	Jumlah SDM KP yang bersertifikat kompetensi di BPPP Tegal (orang)	90	90	1.950	2.550	3.000
				Sertifikasi Kelembagaan Pelatihan dan Penyuluhan sesuai standar lembaga pelatihan	Sertifikasi Kelembagaan Pelatihan dan Penyuluhan sesuai standar lembaga pelatihan di BPPP Tegal (lembaga)	1	1	1	1	1
				SK 7. Terselenggaranya Layanan Pelatihan	Jumlah Norma, Standar, Prosedur	-	-	-	-	-

No	Sasaran Strategis Rencana Kegiatan Kegiatan KKP	Sasaran Program BRSDM	Sasaran Kegiatan Puslatluh KP dan BPPP Tegal	Indikator Kinerja Utama Puslatluh KP	Indikator Kinerja Utama BPPP Tegal	Target				
						2020	2021	2022	2023	2024
			dan Penyuluhan Kelautan dan Perikanan	dan Kreteria yang disusun						
		SP 4. Aparatur Yang Dididik dan Dilatih	SK. 3 Aparatur Yang Dididik dan Dilatih	Aparatur KP yang dilatih	-	-	-	-	-	-
3	SS 9. Tatakelola pemerintahan yang baik	SP5. Tatakelola pemerintahan yang baik	SK 8. Tatakelola pemerintahan yang baik	Jejaring dan/atau kerjasama lingkup Puslatluh yang disepakati dan ditindaklanjuti	-	-	-	-	-	
				Persentase layanan dukungan manajemen internal Pusat Pelatihan dan Penyuluhan KP	-	100	100	100	100	
				Unit kerja lingkup Pusat Pelatihan dan Penyuluhan KP yang lolos penilaian WBK, Tim Penilai Internal KKP	-	-	-	-	-	
				Unit Kerja lingkup Pusat Pelatihan dan Penyuluhan KP yang dibangun untuk diusulkan menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK)	-	-	-	-	-	
				Nilai Rekonsiliasi Kinerja Lingkup Pelatihan dan Penyuluhan KP	-	80	80	80	80	
				Persentase unit kerja yang menerapkan sistem manajemen	82	84	86	88	90	

No	Sasaran Strategis Rencana Kegiatan KKP	Sasaran Program BRSDM	Sasaran Kegiatan Puslatluh KP dan BPPP Tegal	Indikator Kinerja Utama Puslatluh KP	Indikator Kinerja Utama BPPP Tegal	Target				
						2020	2021	2022	2023	2024
				pengetahuan yang terstandar lingkup Puslatluh KP	sistem manajemen pengetahuan yang terstandar BPPP Tegal(%)					
				Indeks Profesionalitas ASN lingkup Puslatluh KP	Indeks Profesionalitas ASN BPPP Tegal (indeks)	72	73	74	75	76
				Persentase penyelesaian temuan LHP BPK Puslatluh KP	Persentase penyelesaian temuan LHP BPK BPPP Tegal (%)	-	100	100	100	100
				Rekomendasi hasil pengawasan lingkup Puslatluh KP yang dokumen tindak lanjutnya telah dilengkapi dan disampaikan	-	-	-	-	-	-
				-	Nilai Kinerja Pelaksanaan Anggaran BPPP Tegal (nilai)	-	89	89	90	90
				-	Nilai Kinerja Anggaran BPPP Tegal (nilai)	85	86	87	88	89

Indikator Kinerja Kegiatan

Program kegiatan kerja BPPP Tegal sesuai rencana strategis tahun 2020 - 2024 adalah pengembangan sumber daya manusia kelautan dan perikanan dengan kegiatan meliputi:

- 1) Penyelenggaraan Pelatihan bagi masyarakat Kelautan dan perikanan;
- 2) Sertifikasi Kompetensi Masyarakat Kelautan dan Perikanan;
- 3) Pendampingan melalui penyuluhan kepada pelaku utama/usaha, terdiri dari penumbuhan kelompok perikanan dan peningkatan kelas kelompok serta pendampingan pelaku utama/usaha menjadi UMKM-KP yang mendapat kemudahan akses pembiayaan, pemasaran dan pembuatan ijin usaha;
- 4) Dukungan operasional Penyuluh Perikanan yang melakukan penyuluhan kepada masyarakat KP;
- 5) Peningkatan Sarana dan Prasarana Pelatihan dan penyuluhan, kegiatan ini terdiri dari Pengadaan kendaraan fungsional pelatihan dan penyuluhan kelautan dan perikanan, Pengadaan pengolahan Data;
- 6) Pengembangan Kelembagaan pelatihan dan penyuluhan, meliputi Pengembangan Ketenagaan Kelautan dan Perikanan, Penyusunan Pedoman/standar/juknis/juklak, Penyusunan database, dan Penyusunan kurikulum, modul pelatihan serta metode dan materi penyuluhan;
- 7) Pelayanan Perkantoran, kegiatan ini terdiri dari Penyelenggaraan operasional dan pemeliharaan perkantoran, dan penyiapan bahan-bahan pimpinan;
- 8) Dokumen Perencanaan, Data informasi dan Kerjasama, kegiatan ini terdiri dari Penyusunan Rencana Kerja, KAK, RAB, dan RKAKL, Penyusunan Rencana Operasional Kegiatan, Penyusunan Standar Biaya Khusus Pelatihan dan Penyuluhan KP, Penyusunan Perjanjian Kinerja, Penyusunan Rumusan Kebijakan Pelatihan dan Penyuluhan Kelautan dan Perikanan, Rapat Konsolidasi Perencanaan Pelatihan dan Penyuluhan KP, Koordinasi perencanaan program dengan instansi terkait, penyusunan database dan statistik pelatihan dan penyuluhan KP, Kerjasama pelatihan dan penyuluhan dengan instansi terkait lainnya, Sistem informasi, Publikasi, dan Pameran.
- 9) Dokumen Monitoring, Evaluasi, Pelaporan dan Dokumentasi, kegiatan ini terdiri dari Monitoring Penyelenggaraan Pelatihan dan Penyuluhan, Evaluasi Pasca

Pelatihan dan Penyuluhan KP, dan Penyusunan Laporan Bulanan, Laporan Triwulan, Laporan Tahunan dan LAKIP.

- 10) Dokumen Ketatausahaan, Pelaporan Keuangan dan Pelaporan Barang Milik Negara, kegiatan terdiri dari Penyusunan laporan Keuangan dan BMN, Pengelolaan Administrasi Persuratan, Penyusunan Juklak Pelaksanaan Puslatluh KP, dan PBJ.
- 11) Dokumen Pengelolaan Kepegawaian dan Kelembagaan, kegiatan ini terdiri dari Pengelolaan Administrasi Kepegawaian, Implementasi SIMPEG.

2. Kerangka Pendanaan

Untuk dapat melaksanakan arah kebijakan, strategi, dan program pelatihan dan penyuluhan kelautan dan perikanan, serta mencapai target sasaran utama, dibutuhkan dukungan kerangka pendanaan yang memadai. Pendanaan pelatihan dapat bersumber dari pemerintah (APBN dan APBD, Dana Alokasi Khusus/DAK), swasta, dan masyarakat. Pendanaan akan digunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat, yakni kesejahteraan masyarakat kelautan dan perikanan. Sementara itu dilakukan penguatan sinergi pendanaan antara KKP, K/L terkait, APBD serta sumber lain yang tidak mengikat.

Balai pelatihan dan Penyuluhan Perikanan Tegal dalam Rancangan Rencana Kegiatan mengusulkan rencana pendanaan melalui APBN tahun 2020 –2024 dan PNBP Tahun 2020 -2024. Anggaran tersebut akan didistribusikan pada setiap seksi setiap tahunnya untuk membiayai Kegiatan Pelatihan dan Penyuluhan Kelautan dan Perikanan oleh BPPP Tegal.

Berikut rencana kerangka pendanaan kegiatan pelatihan dan penyuluhan kelautan dan perikanan balai Pelatihan dan Penyuluhan Perikanan Tegal tahun 2020 – 2024 :

Tabel 3. Rencana Kerangka Pendanaan BPPP Tegal 2020-2024

KODE	OUTPUT / SUB OUTPUT	VOLUME TARGET				ALOKASI (RP JUTA)				TOTAL 2020-2024 (Rp.Milyar)
		2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024	
	Pelatihan dan Penyuluhan KP					88.433,97	134.610,07	181.840,07	189.700,07	594.584,18
DCC	Pelatihan Bidang Pertanian dan Perikanan									
	Masyarakat Kelautan dan Perikanan yang Bersertifikat Kompetensi	90	1950	2550	3000	54,00	1.230,00	1.530,00	1.800,00	4.614,00
DDA	Penelitian dan Pengembangan Produk									
	Inovasi yang diterapkan sebagai percontohan Penyuluhan Kelautan dan Perikanan	1	5	6	6	57,33	460,00	530,00	600,00	1.647,33
QDD	Pembinaan Kelompok Masyarakat									
	Kelompok Pelaku Utama/Usaha yang Mendapatkan Pendampingan dari Penyuluh KP	5879	6179	7041,186	7903,372	12.042,53	15.200,00	19.150,00	20.030,00	66.422,53
RAL	Sarana Bidang Kemaritiman, Kelautan dan Perikanan									
	Sarana Pelatihan Kelautan dan Perikanan	1	2	2	2	2.147,66	7.000,00	21.000,00	20.000,00	50.147,66
RBQ	Prasarana Bidang Kemaritiman, Kelautan dan Perikanan									
	Prasarana Pelatihan Kelautan dan Perikanan	1	2	2	2	1.600,04	6.200,00	20.000,00	19.000,00	46.800,04
SCC	Pelatihan Bidang Pertanian dan Perikanan									
	Masyarakat Kelautan dan Perikanan yang dilatih	10462	12500	17300	20000	7.982,98	40.250,00	55.360,00	64.000,00	167.592,98
EAA	Layanan Perkantoran									
	Layanan Perkantoran Pelatihan dan Penyuluhan Kelautan dan Perikanan	1	1	1	1	64.270,07	64.270,07	64.270,07	64.270,07	257.080,28
EAB	Layanan Perencanaan dan Penganggaran Internal									
	Layanan Perencanaan dan Penganggaran Internal Pelatihan dan Penyuluhan KP	1	1	1	1	8,40	8,40	8,40	8,40	33,60
EAC	Layanan Umum									
	Layanan Umum Pelatihan dan Penyuluhan KP	1	1	1	1	192,76	192,76	192,76	192,76	771,02
EAL	Layanan Monitoring dan Evaluasi Internal									
	Layanan Monitoring dan Evaluasi Internal Pelatihan dan Penyuluhan KP	1	1	1	1	78,20	78,20	78,20	78,20	312,80

BAB V

PENUTUP

Pencapaian tujuan atau visi yang menjadi acuan tidak terlepas dari sebuah perencanaan yang proporsional dan matang. Dokumen Rencana Kegiatan ini merupakan sebuah upaya dari BPPP Tegal untuk mewujudkan cita-cita bangsa yaitu menjadikan Indonesia sebagai negara yang berdaulat, mandiri dan berkepribadian gotong royong. Tentu saja bentuk perwujudan itu adalah dalam bidang kelautan dan perikanan yang merupakan spesialisasi dari Kementerian Kelautan dan Perikanan.

Sebuah upaya tidak akan terlepas dari suatu halangan yang harus dihadapi dan diselesaikan. Halangan-halangan yang akan datang diharapkan bukan menjadi sesuatu yang melemahkan, namun harus menjadi sesuatu yang menguatkan. Untuk itu dalam pelaksanaannya dokumen rencana kegiatan ini masih akan membutuhkan penyempurnaan berupa penyesuaian-penyempurnaan yang bersifat positif sehingga apa yang menjadi tujuan dapat terwujud.

Kepala BPPP Tegal,



Achmad Subijakto